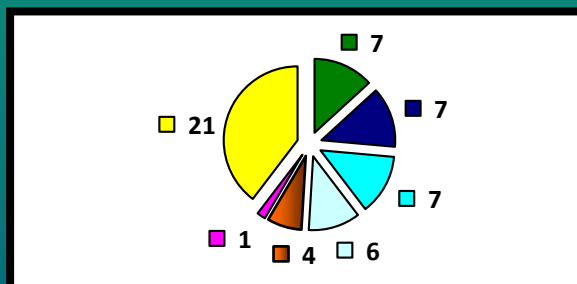
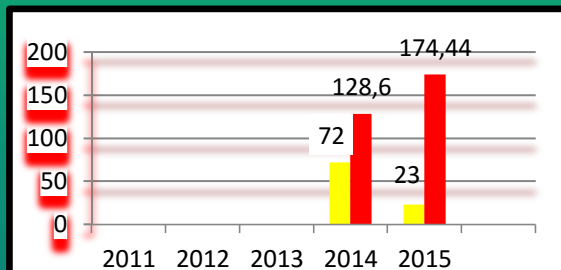


PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) REVISI TAHUN 2016-2021

(SESUAI PERMENDAGRI 86 TAHUN 2017)



SEKRETARIAT
BADAN KESBANGPOL
PROVINSI SUMATERA BARAT

Disusun Tahun 2019 (Penyempurnaan)





KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, karena atas karunia, taufik dan hidayah-Nya, revisi Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 dapat tersusun, sesuai dengan waktunya. Revisi dilakukan karena terjadinya perubahan regulasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan berdampak terhadap kebijakan Pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Selain itu perlu penyesuaian sasaran strategis, indikator kinerja dan target capaian kinerja pembangunan karena keterbatasan alokasi dana pembangunan akibat pelimpahan kewenangan dari Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi. Kemudian perubahan adanya nomenklatur SKPD yang harus dilakukan penyesuaian. Revisi Renstra ini disusun untuk dijadikan sebagai bahan masukan terhadap perubahan RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021.

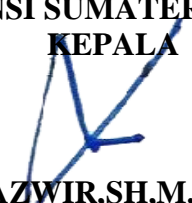
Selanjutnya Renstra itu sendiri menentukan arah, tujuan dan masa depan yang hendak dicapai sesuai tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang memfokuskan pada optimalisasi kinerja Badan Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat menuju good governance. Secara konsisten diharapkan pelaksanaan pemerintahan lebih berhasil guna, dan berdaya guna, bersih dan bertanggungjawab, sejalan dengan tujuan yang hendak dicapai dan sebagai bentuk upaya transparansi terhadap pelayanan publik. Rencana Strategis bertujuan untuk menterjemahkan visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2016-2021, yang disertai dengan program prioritas misi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.

Revisi Renstra ini terdiri dari Pendahuluan, Gambaran Pelayanan, Isu - Isu Strategis, Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan, Rencana Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif. Rencana Strategis ini menyajikan secara garis besar rencana kerja untuk mewujudkan keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat, dengan demikian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatra Barat mempunyai acuan umum tentang arah pembangunan ke depan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Arah ini tentu saja masih harus dirinci dan dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, agar skala prioritas setiap program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik lebih kongkrit. Renstra yang telah disusun ini tidak akan ada artinya tanpa ditindaklanjuti dengan pelaksanaan yang maksimal. Komitmen dan motivasi bisa timbul dari keberhasilan mengaktualisasikan diri dalam setiap kegiatan. Harapan kami, Renstra ini dapat dijadikan acuan pembangunan jangka panjang dan sekaligus acuan rencana kerja tahunan.

Mudah-mudahan dengan disusunnya Renstra ini dapat lebih memacu gerak dan langkah Aparatur Sipil Negara di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang. Dengan ditetapkannya Revisi Rencana Strategis (Renstra-SKPD) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, berarti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik telah mempunyai acuan dan pedoman dalam penyusunan perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan tahun 2016-2021. Untuk itu, dalam penyusunan program kerja dan kegiatan pada Seluruh Bidang di lingkungan Badan Keuangan Daerah agar mempedomani Revisi Renstra ini.

Padang, 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPALA**



NAZWIR,SH,M.Hum
Pembina Utama Madya
NIP. 19641111 199003 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR		i
DAFTAR ISI		iii
BAB. I	PENDAHULUAN	
1		
	1.1. Latar Belakang	1
	1.2. Landasan hukum	4
	1.3. Maksud dan Tujuan	6
	1.4. Sistematika Penulisan	7
BAB. II	GAMBARAN PELAYANAN OPD	9
	2.1. Tugas, fungsi dan Struktur Organisasi OPD	9
	2.2. Sumberdaya OPD	17
	2.3. Kinerja pelayanan OPD	19
	2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD	22
BAB. III	PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD	
31		
	3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD	31
	3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	33
	3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kab/Kota	35
	3.4. Telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	36
	3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	37
BAB. IV	TUJUAN DAN SASARAN	39
BAB. V	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	40
BAB. VI	RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDATAAN INDIKATIF	43
BAB. VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	47
BAB. VIII	PENUTUP	49
LAMPIRAN		
Tabel T-C.27		
Tabel T-C.29		

BAB I

PENDAHULUAN

Salah satu tantangan berat yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia di masa mendatang adalah bagaimana mempertahankan persatuan dan kesatuan serta ketahanan nasional, sekaligus mewujudkan budaya politik yang demokratis. Tantangan ini merupakan dasar penentuan arah pembangunan politik dalam negeri ke depan, yang pada dasarnya memiliki dua dimensi, yakni dimensi penguatan persatuan dan kesatuan serta dimensi pembangunan sistem politik.

Sebagai instansi yang memiliki tugas dan fungsi mendukung terwujudnya keamanan dan kenyamanan lingkungan di Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat (Badan Kesbangpol Prov. Sumbar) perlu melakukan reposisi dan reorientasi pelaksanaan tugas secara cekatan, sesuai dengan perubahan lingkungan strategis yang dinamis dan sulit diprediksi. Reposisi dan reorientasi tersebut akan efektif dilakukan, jika segenap jajaran Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat mampu melakukan perubahan paradigma serta mengembangkan prilaku birokrat yang visioner. Segenap jajaran aparatur Badan Kesbangpol dituntut mampu mengimplementasikan tugas dan fungsinya secara profesional, akuntabel dan partisipatif yang berbasis pada instrumen rencana strategis (renstra).

Rancangan renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun setelah disahkannya rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021. Sesuai amanat misi 1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat berperan penting untuk mendukung misi tersebut. Adapun misi 1 RPJMD Prov.Sumbar adalah *“Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab dan berbudaya berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah ”*.

1.1 Latar Belakang.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan kepada daerah untuk menyusun Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD). Dokumen RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, dan program Kepala Daerah yang berpedoman kepada Rencana pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan RPJM Nasional.

Dalam perjalanan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dan memperhatikan ketentuan pasal 15 ayat (4) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan bahwa penyusunan Rancangan RPJMD

menggunakan Rancangan Renstra SKPD. Selain itu berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 Tentang Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, mengamanatkan untuk segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai kelembagaan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016.

Mengacu pada dokumen Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2016-2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menyusun Revisi Rencana Strategis Tahun 2016-2021.

A. Pengertian Renstra

Dalam rangka memenuhi ketentuan dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Provinsi Sumatera Barat maka disusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021. Penyusunan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat.

Penyusunan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 melalui proses transparan, demokratis dan partisipatif, dilakukan karena perubahan nomenklatur pembentukan SKPD yang berdasarkan kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 79 Tahun 2016.

Renstra merupakan suatu dokumen perencanaan yang memuat gambaran keadaan masa depan yang ingin diwujudkan oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat selama lima tahun, memuat sasaran-sasaran strategis yang harus dicapai dalam mengemban misi serta mewujudkan visi melalui pelaksanaan program-program strategis.

Renstra berfokus pada pengembangan suatu visi yang luas dan strategis berdasarkan analisis komprehensif terhadap perkembangan situasi (mencakup kekuatan dan kelemahan) serta lingkungan termasuk peluang dan kecenderungan atau trend yang mengembangkan kegiatan yang berdampak terhadap masyarakat.

Renstra merupakan suatu proses berkelanjutan untuk memperbaiki kinerja sebuah kelompok, komunitas atau organisasi akibat situasi kritis yang dialami dengan mengembangkan visi, tujuan dan metode untuk mencapainya. Tuntutan dan kebutuhan untuk perubahan dituangkan dalam renstra sebagai arah, kebijakan, dan panduan bagi pemangku kepentingan untuk mewujudkannya. Dalam prosesnya, renstra menentukan arah, tujuan, nilai-nilai dan keadaan komunitas serta mengembangkan pendekatan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai target yang telah ditetapkan.

Dalam upaya mencapai efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program Organisasi Perangkat Daerah, serta agar makin eksis dan unggul dalam persaingan dan perubahan lingkungan, Organisasi

Perangkat Daerah harus selalu melakukan perbaikan dan inovasi secara bertahap dan berkelanjutan agar tercipta akuntabilitas dan peningkatan kinerja.

B. Fungsi Renstra

Renstra sebagai pedoman perencanaan lima tahunan berfungsi sebagai :

1. Pedoman komprehensif yang jelas dan mendorong berbagai pihak yang terlibat untuk menentukan tujuan dimasa depan.
2. Dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Organisasi Perangkat Daerah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
3. Sebagai acuan untuk penyusunan Rencana Kerja (Renja) OPD sebagai dokumen operasional tahunan.
4. Pedoman dalam menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan penyusunan laporan-laporan seperti Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Tahunan, LKPD, LPPD dan laporan-laporan lainnya.

C. Proses Penyusunan Renstra

1. Tahap Persiapan

Penyusunan Renstra diawali dengan membentuk tim penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Tim penyusun ini bertugas menyelenggarakan forum OPD, merumuskan rancangan Renstra OPD dan menyusun rancangan penetapan Renstra OPD yang disahkan oleh Keputusan Kepala OPD. Tim penyusun Renstra terdiri dari perwakilan masing masing bidang pada OPD yang bertanggung jawab terhadap perencanaan kinerja.

2. Tahap Perumusan/Penyusunan

Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disusun dengan teknik pengolahan data dan informasi bidang kesatuan bangsa dan politik.

3. Analisis gambaran pelayanan OPD terdiri dari :

Analisis gambaran umum layanan Organisasi Perangkat Daerah untuk mengidentifikasi potensi dan permasalahan pelayanan OPD.

4. Review Renstra K/L

- a. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra K/L
- b. Program prioritas K/L dan target kinerja serta lokasi program prioritas
- c. Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam jangka waktu pelaksanaan Renstra OPD
- d. Program prioritas OPD

5. Penelaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Yang Mencakup :

- a. Tujuan dan sasaran RTRW struktur dan pola ruang

- b. Indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah
 6. Perumusan Isu -isu Strategis
 7. Perumusan Visi dan Misi
 8. Perumusan Tujuan Pelayanan Jangka Menengah OPD
 9. Perumusan Sasaran Pelayanan Jangka Menengah OPD
 10. Tahap Verifikasi
 11. Tahap Penetapan
- D. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan dokumen perencanaan lainnya.
1. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.
Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan mempedomani RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021, sebagai dokumen perencanaan lima tahunan :
 - a. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar merupakan dokumen teknis penjabaran RPJMD Provinsi Sumatera Barat
 - b. Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar memuat visi, misi, arah, kebijakan teknis, dan indikasi rencana program setiap bidang atau fungsi tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu, yang disusun OPD dan berkoordinasi dengan Bappeda.
 2. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renstra K/L.
Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar disusun dengan memperhatikan sasaran sasaran strategis dalam Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.
 3. Keterkaitan Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dengan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar.
Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat 2016 – 2021 merupakan acuan penyusunan Renja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar, yang merupakan kompilasi rencana kerja setiap tahun.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286)
2. Undang-Undang No.25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Amandemen Tahun 2004 Nomor 104 Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421)
3. Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438)
 4. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025
 5. Undang undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817)
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025;
 11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Perda 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 ;
 12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
 13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 37 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.
 14. Surat Keputusan Gubernur Sumatera Barat Nomor 050-1045-2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021
 15. Surat Keputusan Kepala Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Nomor 03/SK/Set-BKPol/2019 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

- a. Mendukung upaya pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021.
- b. Sebagai dokumen perencanaan jangka menengah yang memuat visi, misi, arah kebijakan, strategi, tujuan dan sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- c. Untuk mewujudkan kualitas, integrasi, sinkronisasi, dan sinergitas pembangunan, perencanaan, dan penganggaran dengan memberikan landasan penentuan program dan kegiatan tahunan.
- d. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan program prioritas pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- e. Memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik
- f. Mempermudah pengawasan dan pengendalian program kegiatan serta perencanaan pembangunan bidang kesatuan bangsa dan politik
- g. Meningkatkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan di lingkungan Badan Kesbangpol Prov.Sumbar

2. Tujuan

- a. Memperkuat konsistensi perencanaan dengan pemilihan program dan kegiatan prioritas yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada.
- b. Sebagai tolok ukur dalam upaya mengevaluasi kinerja tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dalam rangka penilaian akuntabilitas kinerja instansi publik.
- c. Sebagai pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan tahunan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat
- d. Sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan agar lebih terarah, efektif dan efisien sesuai perencanaan dan penganggaran.
- e. Sebagai dasar pemikiran, sikap dan tindakan yang berorientasi pada masa depan.
- f. Menyediakan tolak ukur untuk mengukur kinerja selama kurun waktu 5 (lima) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN OPD

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi OPD
- 2.2 Sumberdaya OPD
- 2.3 Kinerja Pelayanan OPD
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan OPD

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bagian ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Pada bagian ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang

sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN OPD

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi OPD

A. Tugas dan Fungsi OPD

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Dalam Peraturan Daerah dimaksud, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Badan Kesbangpol dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Sesuai dengan Perda No. 8 Tahun 2016 tersebut, Badan Kesbangpol mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan provinsi di bidang kesatuan bangsa dan politik;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

B. Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat terdiri dari :

1. Kepala Badan;

2. Sekretariat, terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Keuangan;
3. Sub Bagian Program;

3. Bidang Idiologi dan Wasbang,

1. Sub Bidang Bina Ideologi;
2. Sub Bidang Bina Wasbang;

4. Bidang Kewaspadaan, terdiri dari :

1. Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
2. Sub Bidang Penanganan Konflik;

5. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, terdiri dari :

1. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
2. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;

6. Bidang Politik Dalam Negeri, terdiri dari :

1. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;
2. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu ;

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun tugas pokok dan fungsi masing-masing Bidang secara rinci adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan, pengkoordinasian penyelenggaraan tugas secara terpadu, pelayanan administrasi dan pelaksanaan di bidang program, keuangan, umum dan kepegawaian. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a) Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program badan;
- b) Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program kesekretariatan; dan
- c) Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, umum dan kepegawaian

Sekretariat membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Kepegawaian dan umum;
2. Melaksanakan penyusunan pengolahan dan kepegawaian;
3. Melaksanakan pengusulan gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan lingkungan Badan;
4. Melaksanakan penyiapan dan pengusulan pensiun pegawai, peninjauan masa kerja dan pemberian penghargaan serta tugas/izin belajar, pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan fungsional;
5. Melaksanakan penyusunan bahan pembinaan disiplin pegawai;

6. Melaksanakan penyiapan bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhetian pegawai;
7. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan kepada unit kerja di lingkungan Badan;
8. Melaksanakan penyusunan banan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
9. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
10. Melaksanakan penggandaan naskah dinas;
11. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat;
12. Melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
13. Melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan, dan keamanan kantor;
14. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan sub bagian kepegawaian dan umum;
15. Melaksanakan pembinaan jabatan fungsional Badan;
16. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
17. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
18. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bagian Keuangan

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan perencanaan dan program Sub Bagian Keuangan;
2. Melaksanakan penyusunan bahan dan penyiapan anggaran Badan;
3. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Badan;
4. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan Daerah serta pembayaran lainnya;
5. Melaksanakan perbendaharaan keuangan;
6. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan administrasi keuangan;
7. Melaksanakan penatausahaan belanja langsung dan belanja tidak langsung Badan;
8. Melaksanakan verifikasi keuangan;
9. Melaksanakan Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggung jawaban keuangan;

10. Melaksanakan dan koordinasi penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan administrasi keuangan;
11. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi-kegiatan Sub Bagian Keuangan;
12. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
13. Melaksanakan koordinasi dengan unid kerja terkait; dan
14. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

c. Sub Bagian Program

Sub Bagian Program mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Program;
2. Melaksanakan koordinasi penyusunan perencanaan dan program Badan yang meliputi bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
3. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan umum bidang ideologi dan wasbang, kewaspadaan, pembinaan kemasyarakatan, politik dalam negeri;
4. Melaksanakan penyusunan bahan rencana strategis, laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Badan;
5. Melaksanakan pengelolaan sistem informasi pendidikan dan pelatihan;
6. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bagian Program;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan
8. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait ; dan
9. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2. Bidang Ideologi dan Wasbang

Bidang Ideologi dan Wasbang mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina Ideologi dan bina Wasbang, dengan fungsi sebagai berikut :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang ideologi dan bina wasbang; dan
- b) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Pimpinan.

Bidang Ideologi dan Wasbang membawahi :

a. Sub Bidang Bina Ideologi

Sub Bidang Bina Ideologi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ideologi;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Ideologi;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Ideologi;
4. Melaksanakan pengelolaan data Bina Ideologi;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha Bina Ideologi;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ideologi;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ideologi;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bidang Bina Wasbang

Sub Bidang Bina Wasbang mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Wasbang;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Bina Wasbang;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Bina Wasbang;
4. Melaksanakan pengelolaan data Wasbang;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Wasbang;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Wasbang;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Wasbang;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

3. Bidang Kewaspadaan

Bidang Kewaspadaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang PAM dan Waspadnas penanganan konflik, dengan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang PAM dan Waspadnas ; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di Bidang penanganan konflik.

Bidang Kewaspadaan membawahi :

a. Sub Bidang PAM dan Waspadnas

Sub Bidang PAM dan Waspadnas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang PAM dan Waspadnas;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis PAM dan Waspadnas;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan PAM dan Waspadnas;
4. Melaksanakan pengelolaan data PAM dan Waspadnas;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksarlahan usaha-usaha PAM dan Waspadnas;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi PAM dan Waspadnas;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi, pelaksanaan pemantapan kewaspadaan dini masyarakat serta monitoring dan evaluasi;
9. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi perkembangan kehidupan masyarakat; dan
10. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta monitoring dan evaluasi tenaga kerja asing, Non Government Organization dan lembaga asing di daerah.

b. Sub Bidang Penanganan Konflik

Sub Bidang Penanganan Konflik mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang penanganan konflik;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penanganan konflik;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan penanganan konflik;
4. Melaksanakan pengelolaan data penanganan konflik ;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksarlahan usaha-usaha penanganan konflik ;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi penanganan konflik ;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang penanganan konflik;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan; dan
11. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan monitoring dan evaluasi penanganan konflik.

4. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan

perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan ekonomi, bina ketahanan sosial budaya dan agama, dengan fungsi:

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan ekonomi; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang bina ketahanan sosial budaya dan agama

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan membawahi :

a. Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi

Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis bina ketahanan ekonomi;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan bina ketahanan ekonomi;
4. Melaksanakan pengelolaan data bina Ketahanan Ekonomi;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Bina Ketahanan Ekonomi;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi Bina Ketahanan Ekonomi;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Bina Ketahanan Ekonomi;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

b. Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama

Sub Bidang Bina Ketahanan Sosial Budaya dan Agama mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
4. Melaksanakan pengelolaan data Ketahanan Sosial Budaya dan Agama
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
6. Melaksanakan penyusunan bahan koordinasi ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan

pengambilan kebijakan

8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Ketahanan Sosial Budaya dan Agama;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan.

5. Bidang Politik Dalam Negeri

Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas pokok melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pelaksanaan di bidang fasilitasi parpol dan ormas serta hubungan antar lembaga dan pemilu, dengan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan di bidang fasilitasi parpol dan ormas; dan
- b) Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan di bidang hubungan antar lembaga.

Bidang Politik Dalam Negeri membawahi :

a. Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas

Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;
2. Melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis Fasilitasi Parpol dan Ormas;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi Parpol dan Ormas;
4. Melaksanakan pengelolaan data Fasilitasi Parpol dan Ormas;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha Fasilitasi Parpol dan Ormas;
6. Melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi Parpol dan Ormas;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Fasilitasi Parpol dan Ormas;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

b. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu.

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu mempunyai tugas :

1. Melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan

Pemilu;

2. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
3. Melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penyelenggaraan fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
4. Melaksanakan pengelolaan data fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
5. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan usaha-usaha fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
6. Melaksanakan bahan koordinasi fasilitasi hubungan antar lembaga dan pemilu;
7. Melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
8. Melaksanakan pelaporan dan evaluasi kegiatan Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga dan Pemilu;
9. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
10. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan

2.2 Sumberdaya OPD

A. Sumberdaya Manusia

Secara keseluruhan, komposisi jabatan menurut eselon dalam struktur organisasi Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah sebagai berikut :

1. Eselon II : 1 jabatan
2. Eselon III : 5 jabatan
3. Eselon IV : 11 jabatan

Komposisi personil Badan Kesbangpol Prov. Sumbar saat ini berjumlah 45 orang ASN.

Tabel 2.2.1
Jumlah ASN pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Menurut Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Ket
1	SD	-	
2	SLTP	-	
3	SLTA	16 orang	
4	DIII	1 orang	
5	S1	21 orang	
6	S2	7 orang	
	Jumlah	45 orang	

Tabel 2.2.2

**Jumlah ASN pada Badan Kesbangpol Prov. Sumbar
Menurut Pangkat/Golongan Ruang**

No	Golongan	Jumlah
1	IV	9 orang
2	III	30 orang
3	II	6 orang
4	I	-
	Jumlah	45 orang

B. Sumber Daya Aset

Pada umumnya kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki cukup memadai untuk mendukung pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Nilai aset yang dikelola Badan Kesbangpol per 31 Desember 2018 sebesar Rp.7.073.145.363,- terdiri atas aset tetap sebesar Rp. 6.844.419.963,- dan aset lainnya sebesar Rp. 227.725.400,-. Sarana dan prasarana yang dikelola per Desember 2018 sebagai berikut:

**Tabel 1.4. Daftar Aset Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Per Desember 2018**

No	Jenis Barang	Jumlah
I.	ASET TETAP	
1	Golongan Tanah Tanah	4.535 M2
2	- Golongan Peralatan dan Mesin - Alat-alat angkutan - Alat kantor dan rumah tangga - Alat studio dan alat komunikasi - Alat laboratorium	7 unit 280 unit 5 unit 1 unit
3	Golongan Gedung dan Bangunan Bangunan Gedung	774 M2
II.	ASET LAINNYA	
1	Aset tidak bermanfaat	771 unit

alam menunjang pelaksanaan tugas kedinasan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat memiliki 5 (lima) unit kendaraan dinas operasional roda empat dan 2 (dua) unit kendaraan dinas roda dua sebagaimana yang terlihat dalam tabel 1.4 dibawah:

**Tabel 1.5. Daftar Kendaraan Dinas
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

No	Jenis Kendaraan	Merk	Dipergunakan Untuk
1	Sepeda Motor	Supra X	Operasional Administrasi

2	Sepeda Motor	Vario	Operasional Administrasi
3	Mobil	Pajero	Operasional Kepala Badan
4	Mobil	Innova	Operasional Administrasi
5	Mobil	Isuzu Panther	Operasional Administrasi
6	Mobil	APV	Operasional Administrasi
7	Mobil	Ford Everest	Operasional Administrasi

2.3 Kinerja Pelayanan OPD

Pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab untuk mewujudkan kondisi kehidupan masyarakat yang berwawasan kebangsaan, mempunyai kemauan dan kemampuan untuk bela negara serta mengerti dan mau untuk menggunakan hak-hak politik.

Salah satu cara yang ditempuh untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut adalah dengan membentuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang mengemban tugas dan fungsi untuk memberikan pelayanan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Bentuk-bentuk pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan dan pembinaan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, dan nilai-nilai sejarah kebangsaan
2. Penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kehidupan demokrasi dan politik dalam negeri
3. Penyelenggaraan pembinaan budaya dan pendidikan politik
4. Penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi dan kelembagaan partai politik
5. Penyelenggaraan dan pembinaan kewaspadaan nasional
6. Penyelenggaraan dan pembinaan kerukunan umat beragama
7. Penyelenggaraan kerjasama intelijen keamanan
8. Penanganan Konflik SARA, pemerintahan dan penanganan konflik sosial
9. Penyelenggaraan kewaspadaan dini masyarakat
10. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan orang asing dan lembaga asing
11. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi ketahanan ekonomi, seni, budaya, agama dan kemasyarakatan
12. Penyelenggaraan pembinaan, pengawasan, dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba (narkotika dan zat adiktif lainnya)

Masyarakat Sumatera Barat cukup responsif dalam merespon dinamika sosial, ekonomi, dan politik nasional, disebabkan kondisi masyarakatnya yang cukup heterogen, selain itu akses

informasi yang cukup mudah serta mobilitas penduduknya yang cukup tinggi. Hal tersebut potensial memunculkan konflik sosial dan mampu mengancam stabilitas wilayah. Selama kurun waktu 3 tahun (2016-2018) Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan berbagai macam kegiatan dalam rangka mendukung pencapaian kinerja Provinsi Sumatera Barat di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik. Berbagai masalah dapat tertangani dengan baik, potensi konflik dapat diantisipasi sehingga kondisi di wilayah cukup kondusif.

Tingkat capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target/sasaran Renstra dari tahun ke tahun menunjukkan trend yang meningkat. Hal ini tidak terlepas dari upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan arti persatuan dan kesatuan, pendidikan politik masyarakat, meningkatkan pemahaman akan demokrasi, kerukunan beragama dan sinergitas yang baik antara parpol, ormas/LSM dan pemerintah daerah.

Capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat berdasarkan target/sasaran Renstra Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan
Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat**

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Indikator Kinerja Kunci (IKK)														
1	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah			6	8	10	12	14	6	6	16	100%	75%	160%
2	Kegiatan Pembinaan Terhadap Ormas, LSM dan OKP			1	1	1	1	1	1	1	1	100%	100%	100%

No	Indikator Kinerja	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian			Rasio Capaian		
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Indikator Kinerja Utama (IKU)														
1	Persentase penurunan konflik sosial di Sumbar			5%	5%	5%	5%	5%	20%	25%	33%	400%	500%	660%
2	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar			5%	5%	5%	5%	5%	1,94%	6,21%	8,5%	38,8%	124%	170%

3	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar			60	68	70	72	74	67,46	54,41	69,50	112%	80%	99,2%
---	--	--	--	----	----	----	----	----	-------	-------	-------	------	-----	-------

Berdasarkan tabel T-C.23 tentang pencapaian kinerja 2016-2021 tersebut di atas, dapat diuraikan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yaitu :

1. Untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang terdiri atas kegiatan pembinaan politik di daerah dan kegiatan pembinaan terhadap Ormas, LSM dan OKP, pada tahun 2018 capaian kinerjanya dikategorikan sangat memuaskan yaitu di atas 100%.
2. Untuk Indikator Kinerja Utama yang terdiri atas 3 indikator yaitu persentase penurunan konflik sosial di Sumbar, persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar dan Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI). Ketiga indikator tersebut capaiannya pada tahun 2018 sangat memuaskan (di atas 90%)

Keberhasilan pencapaian IKU dan IKK ini merupakan kerja keras seluruh aparatur Badan Kesbangpol Prov Sumbar yang didukung oleh forum-forum strategis diantaranya FKUB, FKDM, Kominda, Forkopimda, Tim Penanganan Masalah Stratgis Daerah, FPK, Tim POA, Tim Fasilitasi Pemantauan Pemilu dan para mitra kerja serta pemangku kepentingan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Untuk Indikator IKK Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2016-2021 terus mengalami perbaikan di seluruh aspek yaitu :

1. Terlaksananya dialog politik bersama parpol, ormas dan tokoh masyarakat
2. Tersaluranya bantuan keuangan kepada partai politik yang memperoleh kursi
3. Terlaksananya pemantauan (monitoring) pelaksanaan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
4. Terlaksananya sosialisasi dan pembinaan terhadap ormas
5. Terlaksananya sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik
6. Terlaksananya bimtek pengajuan dan pertanggungjawaban bantuan keuangan partai politik
7. Terlaksananya Sosialisasi dan Penguatan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
8. Terpenuhinya jumlah keanggotaan (kursi) DPRD kabupaten/kota di Sumbar

Adapun anggaran dan realisasi pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel T-C.24.

**Anggaran dan Realisasi Pendanaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Provinsi Sumatera Barat**

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-				Realisasi Anggaran pada Tahun ke-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-			Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	1	2	3	1	2	3	Anggaran	Realisasi
Belanja Tidak Langsung	4.565.607.115	4.840.744.970	4.691.110.845,05	4.530.985.482	4.284.376.712	4.252.022.770	4.230.464.720	93,84%	87,83%	90,17%	2,74%	1,25%
Belanja Langsung	4.901.000.000	6.250.730.087	8.148.024.093	6.072.155.160	4.517.255.189	5.723.393.356	7.837.304.271	92,17%	91,56%	96,19%	66,25%	73,49%

Berdasarkan tabel T-C.24 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2018 mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Perkembangan anggaran ini dilatarbelakangi oleh adanya beberapa perubahan peraturan perundang-undangan baik pusat maupun daerah yang mewajibkan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik. Alokasi pembagian anggaran per program/kegiatan setiap tahun tidak sama, tergantung pada prioritas pencapaian sasaran, maupun prioritas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan hasil musrenbang.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan OPD

2.4.1 Analisis Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Kabupaten/Kota

Jika dikaitkan dengan Renstra Kementerian/Lembaga, dalam hal ini Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri, maka Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar telah mengacu pada Renstra Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Berdasarkan Renstra Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Periode 2015-2019, visi Kementerian Dalam Negeri adalah **“Kementerian Dalam Negeri yang menjadi Poros jalannya pemerintahan dan politik dalam negeri, meningkatkan pelayanan publik, menegakkan demokrasi dan menajga integrasi bangsa.”** Untuk mewujudkan visi tersebut, Kementerian Dalam Negeri menetapkan 5 misi. Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum mendukung misi 1 dari 5 misi yang ditetapkan dalam Renstra Kemendagri yaitu **Memantapkan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Kebhinekaan, Menegakkan Persatuan dan Kesatuan, Demokratisasi, serta Membangun Karakter Bangsa dan Stabilitas Dalam Negeri.**

Kementerian dalam negeri menetapkan tujuan dan sasaran untuk mewujudkan visi dan misi tersebut. Tujuan yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 adalah **“Kokohnya persatuan**

dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara". Adapun sasaran yang ditetapkan untuk mendukung misi 1 yang menjadi tanggung jawab Ditjen Polpum Kemendagri adalah :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa dengan indikator kinerja jumlah peristiwa konflik sosial dengan target sebesar ≤ 83 peristiwa pada tahun 2019.
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas dengan 2 indikator kinerja yaitu :
 - a. Persentase partisipasi politik masyarakat pada saat Pemilu sebesar 77,% (tahun 2019)
 - b. Persentase peristiwa konflik berlatar belakang Pemilu dan Pilkada sebesar ≤ 10 % pada tahun 2019

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Kementerian Dalam Negeri yang sejalan dengan visi, misi, serta arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional, Kementerian Dalam Negeri telah menetapkan 10 arah kebijakan. Dari 10 arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum berperan dalam mewujudkan arah kebijakan yang pertama yaitu menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila, melalui strategi :

1. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik
2. Penguatan dan internalisasi idiologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan
3. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan
4. Pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya
5. Peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri

Untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut, Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum menyusun 1 program yaitu Program Pembinaan Politik dan Penyelenggaraan Pemerintahan Umum dengan sasaran program yaitu meningkatnya ketahanan dan kewaspadaan idiologi, wawasan kebangsaan, ekonomi dan sosial budaya, terpeliharanya kerukunan komponen bangsa guna mewujudkan stabilitas keamanan dalam negeri serta mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila.

Adapun indikator kinerja program (IKP) Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Penurunan jumlah peristiwa gangguan keamanan dalam negeri berlatar belakang idiologi, radikal, isu separatisme, sumber daya ekonomi (sengketa lahan dan sumber daya alam)

- b. Jumlah konflik berlatar belakang isu SARA
- c. Persentase partisipasi politik dalam penyelenggaraan Pemilu

Program ini dijabarkan dalam 6 kegiatan yaitu :

- a. Pembinaan dan Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan
- b. Fasilitasi Politik Dalam Negeri
- c. Fasilitasi Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Fasilitasi Kewaspadaan Nasional
- e. Bina Idiologi, Karakter dan Wawasan Kebangsaan
- f. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Dirjen Polpum

Adapun Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan tujuan yaitu meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat dengan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya tata kelola organisasi dengan indikator nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.
2. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat dengan indikator jumlah konflik sosial di Sumatera Barat dan penurunan angka kriminalitas di Sumbar.
3. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat dengan indikator nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar.

Untuk mendukung sasaran ini ditetapkan 10 program yang terdiri dari 5 program rutin dan 5 program urusan. Program urusan terdiri dari Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan, Program Pencegahan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) dan Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba.

Jika dilihat sasaran dan program/kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan sasaran Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah ada keselarasan sasaran dan program/kegiatan Renstra Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat telah menyusun program dan kegiatan yang untuk mendukung sasaran program dan kegiatan Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum.

Selanjutnya, jika dianalisis Renstra Kab/Kota di Sumbar, masih terdapat 10 dari 19 kabupaten/kota di Sumbar yang sasaran dan program kegiatannya belum mendukung pencapaian

program pembangunan yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi diantaranya Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman, Kota Pariaman, Kota Padang Panjang, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kota Sawahlunto, Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Dhamasraya dan Kabupaten Pasaman Barat. Sedangkan untuk 9 kabupaten/kota yang lain, program dan kegiatannya sudah sinergis dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi. Hal ini disebabkan keterbatasan alokasi anggaran pada saat penyusunan dokumen perencanaan yang alokasinya disesuaikan dengan kemampuan daerah masing-masing.

2.4.2 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam ruang wilayah Provinsi Sumatera Barat, perkembangan dan pertumbuhan Sumatera Barat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Karakteristik lokasi dan wilayah meliputi :

- a. Letak dan luas wilayah -> Provinsi Sumatera Barat menjadi gerbang masuk wilayah barat Indonesia yang didukung oleh prasarana transportasi darat, laut dan udara yang memadai seperti jalan nasional Trans Sumatera, Bandara Internasional Minangkabau serta pelabuhan laut internasional Teluk Bayur. Sumatera Barat juga termasuk dalam Kawasan Ekonomi Sub Regional segitiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Thailand.
- b. Kondisi geografis -> terbagi dua yaitu a) ketinggian lahan dan b) kemiringan lereng. Sumatera Barat juga merupakan salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki tatanan geologi kompleks yaitu karena letaknya yang berbeda di daerah tumbukan dua lempeng tektonik besar yaitu lempeng Indo-Australia di bagian selatan dan lempeng Eurasia dibagian selatan. Ini ditandai dengan terdapatnya pusat gerak tektonik di kepulauan Mentawai dan sekitarnya.

Sumatera Barat juga memiliki sumber daya air yang cukup besar. Terdapat 606 sungai yang sebahagian bermuara ke Samudera Hindia di Pantai Barat dan sebahagian lagi ke Pantai Timur Pulau Sumatera. Wilayah Sumatera Barat yang dialiri sungai ini dibagi atas 9 Satuan Wilayah Sungai.

Kondisi iklim Sumatera Barat secara umum dapat digambarkan dari curah hujan dan suhu wilayahnya. Curah hujan setiap tahun berkisar antara 1.980 sampai lebih dari 5.000 mm/tahun. Karakteristik iklimnya termasuk iklim tropika basah dengan suhu rata-rata tercatat antara 18 derajat Celcius – 34 derajat Celcius.

Penggunaan lahan di wilayah Sumatera Barat meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya.

2. Potensi pengembangan wilayah

Potensi pengembangan wilayah di Sumatera Barat dapat ditinjau dalam berbagai aspek

diantaranya potensi kehutanan, pertanian, perkebunan, perikanan, industri, pariwisata dan panas bumi.

3. Wilayah rawan bencana

Posisi Sumatera Barat yang terletak dekat dengan pertemuan lempeng Indo-Australia dan Euroasia di Samudera Hindia sebelah barat Mentawai, serta dilalui jalur patahan Semangka dari Solok Selatan sampai Pasaman, membuat kawasan ini sangat rentan terhadap ancaman gempa bumi dan tsunami. Resiko ancaman bencana lain yang juga cukup tinggi di beberapa kabupaten/kota adalah bencana gerakan tanah/longsor dan potensi banjir bandang.

4. Demografi

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 dan proyeksi penduduk 2010 – 2015 yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Sumatera Barat adalah 4.865.331 jiwa. Sedangkan hasil proyeksi penduduk Sumatera Barat tahun 2015 yang telah resmi dirilis oleh BPS adalah 5.196.300 jiwa.

Pada tahun 2014, angka kriminalitas di Sumatera Barat mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2010 sebanyak 14.332 kasus, tahun 2014 menjadi 18.622 kasus. Sedangkan jumlah aksi unjuk rasa yang terdata adalah dari tahun 2010 sebanyak 80 kasus, naik menjadi 200 kasus pada tahun 2014. Jika ditinjau dari aspek telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, tidak ada faktor penghambat yang mempengaruhi permasalahan organisasi.

Dengan kondisi tata ruang wilayah di Sumatera Barat, sebagaimana yang telah dijabarkan di atas, tugas dan fungsi Kesbangpol sangat relevan dalam rangka mendukung terwujudnya ketahanan ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya, pertahanan dan keamanan di daerah. Keberhasilan pengembangan aspek ekonomi, pertanian, kehutanan, perkebunan, perikanan, industri, dan pariwisata jelas mensyaratkan kestabilan sosial dan politik. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik bertugas memastikan bahwa perwujudan tujuan pengembangan aspek-aspek tersebut sejalan dengan tujuan persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini disebabkan, dalam pengembangan aspek-aspek tersebut, persentuhan atau gesekan antar individu atau kelompok dengan berbagai latar belakang tidak dapat dihindarkan. Dalam kaitannya dengan hal ini, pengelolaan kesatuan bangsa, sebagaimana tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat sangat diperlukan. Dengan demikian, penyusunan Renstra Badan Kesbangpol telah melalui proses pertimbangan telaahan tata ruang wilayah, guna memastikan relevansinya dalam mendukung pencapaian tujuan penataan ruang wikayah sebagaimana dimaksud.

2.4.3 Analisis Terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan

kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, rencana pembangunan harus berdasarkan kebijakan yang mensinergikan dan mengharmonisasikan aspek lingkungan, sosial dan ekonomi (sustainable development). Dalam Undang-Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dalam pasal 15 menyatakan bahwa pemerintah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah atau kebijakan, rencana atau program (KRP).

Proses penyusunan KLHS Renstra Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dengan memperhatikan KLHS RPJMD Provinsi Sumatera Barat. Adapun isu strategis pembangunan berkelanjutan di Sumatera Barat adalah sebagai berikut :

1. Pembangunan mental dan peningkatan pengamalan nilai-nilai adat dan agama
2. Penanganan bencana alam
3. Pengurangan tingkat kemiskinan dan ketimpangan pembangunan antar daerah
4. Penguatan struktur ekonomi daerah
5. Peningkatan infrastruktur
6. Peningkatan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
7. Peningkatan kualitas sumber daya manusia
8. Pemberdayaan usaha mikro kecil, menengah, dan koperasi
9. Peningkatan ketahanan pangan
10. Pemanfaatan potensi kelautan dan kemaritiman
11. Pengurangan pengangguran
12. Globalisasi dan peningkatan daya saing daerah
13. Peningkatan kualitas lingkungan hidup

Dari beberapa isu strategis pembangunan berkelanjutan tersebut di atas, berpotensi menimbulkan kerawanan konflik sosial seperti potensi kerawanan yang ditimbulkan dari kekeringan aktual kemarau, potensi sumber air bawah tanah, pengembangan kawasan wisata pantai, permasalahan sampah dan limbah dan ancaman penambangan tidak ramah lingkungan. Hal ini relevan dengan tugas dan fungsi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pelaksanaan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan umum, untuk mencegah timbulnya kerawanan potensi konflik sosial melalui kegiatan yang berkaitan dengan :

1. Pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa
2. Pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan
3. Deteksi dini potensi konflik dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan

Hasil telaahan RTRW dan hasil analisis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan Badan Kesbangpol pada lima tahun mendatang. Adapun tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Badan Kesbangpol selama lima tahun ke depan adalah sebagai berikut :

A. Tantangan

(a) Kondisi politik :

1. Belum optimalnya pelaksanaan pendidikan politik masyarakat untuk membangun etika, moral dan budaya politik bangsa dalam berdemokrasi.
2. Belum maksimalnya infra struktur politik dalam melaksanakan fungsi pendidikan dan kaderisasi politik sebagai pilar demokrasi.
3. Adanya fenomena disintegrasi bangsa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
4. Masih eksisnya perilaku politik yang tidak responsif terhadap agenda reformasi.
5. Kebebasan menyampaikan aspirasi tanpa memperhatikan norma dan etika yang menunjukkan perilaku masyarakat yang belum dewasa dalam berdemokrasi.

(b) Kondisi Sosial:

1. Belum mantapnya wawasan kebangsaan di kalangan masyarakat.
2. Belum mantapnya kesadaran akan pluralisme dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
3. Belum mantapnya kewaspadaan dan ketahanan bangsa terhadap pengaruh globalisasi.
4. Masih tingginya kriminalitas, kenakalan remaja, peredaran dan penyalahgunaan narkoba.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalan sumber pendapatan asli daerah
3. Masih signifikannya kesenjangan pendapat antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.

(d) Kondisi Keamanan dan Ketentraman :

1. Masih terdapatnya konflik sosial dan politik serta aksi unjuk rasa yang menjurus anarkis dan berdampak mengganggu ketentraman dan keamanan.
2. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi

secara dini berbagai gejala sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

3. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat terhadap budaya luar.

B. Peluang

Sedangkan peluang yang dimiliki adalah sebagai berikut :

(a) Kondisi Politik :

1. Makin terbukanya komunikasi politik antara infra dan supra struktur politik.
2. Makin berperannya kelembagaan legislatif dalam memperjuangkan aspirasi dan kepentingan rakyat.
3. Berkembangnya ormas sebagai aset pembangunan daerah.
4. Makin meningkatnya kepedulian ormas dalam pemberdayaan masyarakat.
5. Berkembangnya partisipasi politik masyarakat.

(b) Kondisi Sosial Budaya :

1. Terbukanya kesempatan pengembangan budaya lokal sebagai aset budaya nasional.
2. Meningkatnya kreativitas dan peran serta masyarakat dalam upaya pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa sebagai perekat NKRI.
3. Makin mantapnya kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis dan berdaya tahan terhadap pengaruh budaya asing sesuai dengan falsafah hidup masyarakat Sumatera Barat "adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah"
4. Meningkatnya kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap laten ideologi lain yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945.
5. Makin meningkatnya pengembangan wawasan kebangsaan di tengah kehidupan bermasyarakat.
6. Berkembangnya perguruan tinggi sebagai sumber penyerapan iptek.

(c) Kondisi Ekonomi :

1. Masih potensialnya kemampuan perekonomian rakyat sebagai pendukung perekonomian daerah.
2. Masih potensialnya kekayaan sumber daya alam dan objek wisata sumber kekuatan perekonomian daerah.
3. Terbukanya kesempatan masyarakat untuk melakukan inovasi teknologi.
4. Kondisi geografis Sumatera Barat yang berbatasan dengan provinsi lain yang kaya sumber daya alam.

5. Penduduk Sumatera Barat yang jumlahnya cukup besar, berpotensi sebagai tenaga kerja.

(d) Kondisi Keamanan/Ketentraman :

1. Terkoordinasinya penanganan masalah yang dapat menimbulkan gangguan keamanan dan ketentraman masyarakat.
2. Berperannya tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat dalam membantu konflik dan mempercepat terwujudnya kerukunan dan kedamaian kehidupan masyarakat.
3. Makin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap perilaku pelanggaran HAM yang mengusik rasa keadilan.
4. Semakin tingginya kesadaran masyarakat untuk menjunjung tinggi supremasi hukum.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan OPD

Identifikasi permasalahan Badan Kesbangpol Prov. Sumbar dalam menjalankan tugas dan fungsinya diantaranya :

1) Hambatan Internal

1. Belum terpenuhinya kebutuhan ideal sumber daya manusia Badan Kesbangpol Prov.Sumbar baik secara kuantitas maupun kualitas
2. Masih belum terpenuhinya sarana dan prasarana dalam menunjang aktivitas perkantoran
3. Belum maksimalnya tugas-tugas internal yang dipengaruhi oleh standar dan pedoman kerja yang relatif masih terbatas, adanya tumpang tindih tupoksi dan program/kegiatan OPD lainnya
4. Minimnya atau terbatasnya anggaran untuk melakukan kegiatan secara berkesinambungan.

2) Hambatan Eksternal

1. Aspek kelembagaan :

1. Dengan keluarnya UU no 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, status kelembagaan Kesbangpol hingga saat ini belum jelas (diatur dalam ketentuan peralihan) sehingga kewenangan yang menjadi urusan Badan Kesbangpol Prov Sumbar belum terukur secara jelas.
2. Adanya perbedaan visi dan misi antara Kesbangpol Provinsi dengan Kesbangpol kabupaten/kota sehingga program-programnya tidak fokus dalam penanganan masalah kesbangpol.
3. Adanya perbedaan bentuk nomenklatur antara Kesbangpol Provinsi dan Kesbangpol kabupaten/kota. Misal, di kota Padang Panjang, Kesbangpol hanya merupakan bagian dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Kesbangpol, sehingga tidak mendapat alokasi dan prioritas anggaran yang cukup untuk menjalankan tugas dan fungsinya di daerah tersebut.
4. Belum semua Badan/Kantor Kesbangpol membentuk seluruh tim atau forum strategis sesuai dengan peraturan yang berlaku seperti Forum Kerukunan Umat Beragama, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat, Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan, Tim Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri, tim Fasilitasi Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, Tim Pengawasan Orang Asing, tim Komunitas Intelijen Daerah dan yang terbaru

Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme.

2. Aspek politik :
 1. Masih rendahnya tingkat pemahaman politik masyarakat dalam kehidupan demokrasi
 2. Belum maksimalnya peran ormas sebagai mitra pemerintah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan
 3. Belum terciptanya etika dan budaya politik yang demokratis
 4. Belum terwujudnya pemahaman partai politik dalam menciptakan transparansi dan akuntabilitas bantuan keuangan.
3. Aspek Sosial
 1. Maraknya pola kebebasan berperilaku dalam kehidupan masyarakat setelah era reformasi
 2. Kurangnya kepedulian komponen terkait (tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan aparatur) dalam pemantapan wawasan kebangsaan
 3. Kurangnya program program pembinaan karakter bangsa
 4. Belum banyaknya program-program pembangunan karakter bangsa yang dimasukkan dalam sistem pendidikan formal maupun informal
 5. Tidak adanya pendidikan/penataran seperti P4 (Pedoman Penghayatan Pengamalan Pancasila) di sekolah sekolah maupun lembaga pendidikan lainnya
4. Aspek Ekonomi :
 1. Belum mantapnya pemberdayaan ekonomi rakyat sebagai basis perekonomian daerah.
 2. Masih rendahnya kemampuan kemandirian keuangan daerah karena belum intensifnya penggalian sumber pendapatan asli daerah
 3. Masih signifikannya kesenjangan pendapatan antar masyarakat di daerah sehingga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial.
 4. Belum terkelolanya aset daerah dengan baik.
 5. Masih terbatasnya lapangan kerja, sehingga angka pengangguran masih tinggi.
 6. Masih kurangnya sinergitas antara aparatur dan organisasi organisasi terkait dalam mengelola dan meredam permasalahan ekonomi yang timbul akibat adanya kebijakan kebijakan pemerintah pusat (misal, kenaikan harga BBM atau tarif dasar listrik)
5. Aspek Keamanan dan Ketentraman :
 1. Masih rendahnya kemampuan aparat dalam mendeteksi, mencegah dan mengantisipasi secara dini berbagai gejolak sosial politik yang dapat mengganggu tatanan kehidupan bermasyarakat.
 2. Masih lemahnya daya tangkal masyarakat dan aparat sebagai antisipasi budaya luar yang tidak sesuai dengan budaya lokal dan nasional.
 3. Belum sinergisnya aparatur dan tokoh tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam

mencegah, menangani dan menghentikan konflik sosial.

4. Belum berperan aktifnya aparatur, tokoh masyarakat/agama/adat dan lainnya dalam upaya penanganan keamanan lingkungan.
5. Belum optimalnya peran forum-forum strategis kesbangpol dalam deteksi dini permasalahan keamanan dan ketertiban.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

A. Visi Pembangunan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021

Mengacu pada visi pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005 – 2025, maka visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih adalah sebagai berikut :

**TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI
DAN SEJAHTERA**

B. Misi Pembangunan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2016 – 2021 adalah :

1. Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat dan berbudaya berdasarkan falsafah “adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah’
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, beriman, berkarakter dan berkualitas tinggi.
4. Meningkatkan ekonomi masyarakat berbasis kerakyatan yang tangguh, produktif dan berdaya saing regional dan global, dengan mengoptimalkan pemanfaatan potensi sumberdaya pembangunan daerah
5. Meningkatkan infratraktur dan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan

Renstra Badan Kesbangpol Prov. Sumbar Tahun 2016 – 2021 disusun untuk menunjang misi 1 Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat terpilih, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol Sumbar, instansi ini memiliki tujuan Meningkatkan Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah’

Hal ini diwujudkan dalam sejumlah program urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang sesuai dengan sasaran nomor 2 dalam misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Meningkatnya kualitas kehidupan beragama dan kerukunan antar umat beragama”. Program programnya adalah :

1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
2. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan
3. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Sedangkan program kerja Badan Kesbangpol yang sesuai dengan sasaran 3 dalam misi 1 RPJMD 2016 – 2021 yaitu “Berkurangnya penyakit masyarakat” adalah :

1. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat
2. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Untuk mencapai visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah, terdapat faktor penghambat dan pendorong pelayanan OPD.

Faktor penghambat :

1. Adanya pergesekan antar masyarakat maupun antar kelompok yang dilatar belakangi perbedaan Suku, Ras dan Agama;
2. Menurunnya kesadaran masyarakat akan pentingnya hidup berbangsa dan bernegara;
3. Adanya krisis kepercayaan terhadap aparaturnya Pemerintah;
4. Belum adanya peraturan yang mengatur masalah jabatan fungsional sehingga kinerja pegawai belum optimal

Faktor pendorong :

1. Adanya dukungan kebijakan politik Pemerintah Pusat untuk membangun sistem politik Indonesia yang lebih demokratis, melalui upaya penataan sistem pemerintahan daerah, penyempurnaan paket undang-undang politik dan penyelenggaraan sistem pemilukada serentak.
2. Adanya kesamaan, keterkaitan dan keselarasan visi dan misi kepala daerah Provinsi Sumatera Barat dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 yaitu : *”Terwujudnya Sumatera Barat yang madani dan sejahtera, khususnya misi ke-1 dan ke-3, dengan pembangunan di bidang kesbangpol.*
3. Adanya dukungan dana dari APBD untuk pelaksanaan program dan kegiatan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat.
4. Adanya dukungan partisipasi masyarakat yang tergabung dalam LSM, Ormas dan Perguruan Tinggi terhadap kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam bentuk kritik, saran dan kerjasama dalam bidang politik, kesatuan bangsa dan wawasan kebangsaan

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Kabupaten/Kota

Di samping memastikan sinkronisasi dengan RPJMD Provinsi Sumatera Barat, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat juga melakukan telaahan terhadap Renstra Kementerian/Lembaga yang dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri dan Renstra Kabupaten/Kota. Dengan prioritas nawacita sebagai payung utama, aspek utama telaahan mencakup visi dan misi Kementerian Dalam Negeri serta visi dan misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 3.1
Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah

Prioritas Nawacita ke 9	Visi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	Visi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia	Terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa melalui sistem politik yang demokratis dalam wadah NKRI	Terwujudnya kehidupan masyarakat Sumatera Barat yang aman, demokratis, bersatu berdasarkan Pancasila dan UUD 1945
	Misi Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri	Misi Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memelihara dan memantapkan keutuhan NKRI 2. Memantapkan sistem politik dalam negeri yang demokratis dalam wadah NKRI 3. Memantapkan wawasan kebangsaan, ideologi dan kewaspadaan nasional, pembauran bangsa, kesadaran dan kemampuan bela negara, serta wawasan warga negara dengan didukung berperannya institusi-institusi sosial dan budaya bagi penguatan integrasi sosial. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional. 2. Mewujudkan stabilitas masyarakat yang kondusif untuk mendukung terciptanya ketahanan bangsa di Sumatera Barat

Dalam upaya pencapaian sasaran jangka menengah yang telah ditetapkan, Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat juga mengalami beberapa hambatan. Faktor-faktor penghambat tersebut diantaranya :

1. Belum optimalnya peran dan fungsi forum-forum pendukung pelaksanaan tugas untuk mewujudkan stabilitas keamanan dan kenyamanan, diantaranya Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Penguatan Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) serta Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT).
2. Berbeda-bedanya penanganan persoalan kesatuan bangsa dan politik di kabupaten/kota, sesuai dengan kemampuan anggaran dan koordinasi badan/kantor kesbangpol di daerah terhadap pihak-pihak pemangku kepentingan.
3. Masih belum selarasnya program kerja Kesbangpol Provinsi dengan program kerja Kesbangpol Kabupaten/kota, juga belum selarasnya program kerja Kesbangpol di daerah dengan program kerja Direktorat Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri.
4. Belum optimalnya akses terhadap terhadap data dan informasi

Sedangkan hal hal yang menjadi faktor pendorong pencapaian sasaran adalah :

1. Kemajemukan masyarakat Sumatera Barat masih bisa dikelola dengan baik dan karakteristik masyarakat Minangkabau yang hidup berdasarkan falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah masih menjadi kekuatan yang mampu menyatukan perbedaan.
2. Adanya Tim Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) dan Tim Penanganan Masalah Strategis Daerah di Sumatera Barat yang terdiri dari unsur Badan Intelijen Negara, Kejaksaan Tinggi, Kepolisian Daerah, jajaran TNI, serta tokoh masyarakat dan ulama senantiasa aktif bekerjasama dengan Badan Kesbangpol Sumbar untuk meredam potensi konflik.

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Dari sisi telaahan rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis, faktor-faktor penghambat dan pendorong yang mempengaruhi sasaran yang ditetapkan adalah :

Faktor penghambat :

1. Penggunaan lahan/kawasan tertentu yang belum sesuai dengan peruntukannya, sehingga menimbulkan potensi konflik
2. Koordinasi lintas SKPD belum maksimal

Faktor pendorong :

1. Adanya program terpadu lintas sektoral

3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

1) Analisis SWOT (*Strengthen, Weakness, Opportunities and Thread*)

Upaya mewujudkan stabilitas sosial politik dan persatuan serta kesatuan bangsa memerlukan energi yang besar dan terencana serta melibatkan seluruh *stakeholder* baik pemerintah maupun masyarakat. Dalam perkembangan dewasa ini, harus diakui masih selalu ada pihak-pihak yang menginginkan adanya perpecahan dan konflik atas nama kelompok dan kepentingan tertentu. Dalam kerangka pemikiran seperti itu, disusunlah analisis SWOT dalam menjalankan strategi.

2) Isu isu Strategis

Isu-isu strategis merupakan permasalahan-permasalahan mendasar di bidang kesatuan bangsa dan politik dalam negeri yang memerlukan penanganan prioritas. Untuk tahun 2016 – 2021, isu-isu strategis yang akan ditangani oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar adalah :

1. Melakukan pembinaan dan pembekalan untuk meningkatkan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional dalam rangka memantapkan pengamalan Pancasila, pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pelestarian Bhineka Tunggal Ika serta pertahanan dan pemeliharaan keutuhan NKRI
2. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk meningkatkan kerukunan hidup umat beragama serta mencegah menyebarnya aliran kepercayaan dan aliran sesat yang menyimpang dari ajaran agama guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional
3. Melakukan pembinaan dan penguatan kapasitas dan kemampuan aparaturnya Kesbangpol Provinsi dan Kabupaten/kota dalam rangka deteksi dini untuk penanganan masalah konflik sosial baik masalah perbatasan, lahan/ SDA maupun SARA.
4. Melakukan sejumlah langkah strategis untuk mendukung upaya penurunan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di wilayah Sumatera Barat, diantaranya melalui pelaksanaan tes urine dikalangan pejabat pemerintah provinsi Sumatera Barat, pembahasan dan pembuatan Rancangan Peraturan Daerah tentang bahaya penyalahgunaan narkoba serta berbagai upaya preventif lainnya.
5. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan sebagai upaya mendukung penurunan angka penyakit masyarakat.
6. Melakukan sejumlah sosialisasi dan pembekalan untuk mendukung gerakan revolusi mental yang merupakan program prioritas nasional pemerintahan saat ini.

Penentuan isu isu strategis bidang kesatuan bangsa dan politik yang merupakan target kinerja 2016 – 2021 adalah melalui :

1. Monitoring yang dilakukan ke kabupaten/kota
2. Hasil koordinasi tim dan forum mitra masyarakat yang dibentuk oleh Badan Kesbangpol Prov. Sumbar (Tim Kominda, FKDM, FKUB, Forum Pembauran Kebangsaan, dll)
3. Berpatokan pada capaian kinerja lima tahun yang lalu

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja perangkat daerah selama 5 (lima) tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Kesbangpol Prov.Sumbar tahun 2016-2021 beserta indikator kerjanya disajikan dalam Tabel T-C.25 sebagaimana berikut ini.

Tabel-C.25

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya kinerja organisasi (Indikator : Nilai Evaluasi SAKIP)	Meningkatnya tata kelola organisasi	1.Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	BB	BB	BB	BB	BB
2	Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat (Indikator : Indeks Ketahanan Nasional)	Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	1. Jumlah konflik sosial di Sumbar 2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%	<5 5%
		Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	60	68	70	72	74

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan yang hendak dicapai oleh Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dalam lima tahun mendatang tertuang pada tabel T-C.26.

Tabel T-C.26
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradab, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Meningkatnya stabilitas keamanan di Sumatera Barat	1. Meningkatnya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kemampuan dalam perencanaan kontijensi serta mengatasi berbagai konflik dalam kehidupan bermasyarakat yang mengarah kepada gangguan dan ancaman terhadap ketentraman masyarakat. 2. Meningkatkan pengawasan dan antisipasi kemungkinan terjadinya eksekusi dari keberadaan/ kehadiran orang asing di Sumatera Barat 3. Meningkatkan pemantapan koordinasi dalam rangka pemantapan dan pengawasan organisasi aliran kepercayaan masyarakat 4. Meningkatkan kerukunan antar umat beragama yang dialandasi toleransi, saling menghormati dalam pengamalan ajaran agama 5. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi ketahanan ekonomi dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban yang diakibatkan oleh gejolak ekonomi dalam kehidupan masyarakat. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan rapat tim, koordinasi serta memberikan pelatihan dalam rangka penanganan masalah strategis daerah. 2. Membentuk tim pengawasan orang asing provinsi Sumatera Barat dan melakukan rapat-rapat pembahasan keberadaan orang asing. 3. Melakukan rapat pembahasan dan sosialisasi peraturan dalam penanganan aliran kepercayaan masyarakat 4. Menyelenggarakan forum kerukunan umat beragama 5. Melakukan monitoring dan evaluasi ketahanan ekonomi ke kabupaten/kota di Sumatera Barat

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA			
MISI I : Meningkatkan tata kehidupan yang harmonis, agamis, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah” Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Mengembangkan kesadaran berbangsa dan bernegara di semua aspek kehidupan masyarakat. 7. Memantapkan proses pembauran kebangsaan di segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 8. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang makna nilai-nilai luhur Pancasila di semua aspek kehidupan masyarakat. 9. Meningkatkan pengetahuan aparatur, tokoh agama, ormas/LSM dalam pencegahan, penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. 10. Meningkatkan koordinasi dan pengawasan serta pembinaan terhadap pencegahan dan pemberantasan maksiat. 11. Meningkatkan pengetahuan pengurus ormas-ormas/LSM mengenai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Ormas/LSM 	<ol style="list-style-type: none"> 6. Melakukan koordinasi dan mengadakan forum pemantapan wawasan kebangsaan 7. Memberikan sosialisasi dalam rangka memperkuat rasa kebangsaan 8. Memberikan sosialisasi tentang nilai nilai luhur bangsa 9. Mengadakan pembekalan bagi aparatur dan masyarakat terkait pencegahan, penanggulangan dan peredaran gelap narkoba. 10. Melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pencegahan dan pemberantasan maksiat. 11. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap aktivitas ormas/LSM
	2. Meningkatnya kualitas demokrasi di Sumatera Barat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem dan budaya politik yang demokratis yang ditopang dengan kemandirian infra struktur politik serta mantapnya interaksi antara infra dan supra struktur politik. 2. Mendewasakan sikap dan prilaku masyarakat dalam berdemokrasi. 3. Meningkatkan koordinasi terkait isu isu strategis di jajaran Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan monitoring dan evaluasi keberadaan infra struktur politik di Sumatera Barat 2. Menyelenggarakan fasilitasi dan pembekalan politik bagi masyarakat. 3. Menyelenggarakan forum komunikasi di jajaran Kesbangpol dan Provinsi dan Kabupaten/kota di Sumatera Barat

VISI : TERWUJUDNYA SUMATERA BARAT YANG MADANI DAN SEJAHTERA

MISI II : Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan professional

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatnya kinerja organisasi	Meningkatnya tata kelola organisasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan keterpaduan dalam mengembangkan kapasitas dan manajemen aparatur 2. Meningkatkan manajemen pengelolaan kepegawaian yang efektif, efisien dan akuntabel berbasis teknologi informasi. 3. Meningkatkan penerapan pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja aparatur 4. Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah 5. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur pengadaan barang dan jasa 6. Mengembangkan dan memanfaatkan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pengelolaan manajemen kepegawaian (rekrutmen, mutasi, promosi dan pengembangan karir aparatur) 2. Peningkatan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan aparatur 3. Penerapan reward dan punishment bagi aparatur berbasis indikator kinerja 4. Percepatan penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis acrual 5. Peningkatan kualitas implementasi sistem e-procurement 6. Pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

BAB VI

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

Dengan ditetapkannya strategi pencapaian sasaran dan tujuan melalui penetapan kebijakan, maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat menetapkan program dan kegiatan prioritas selama 5 tahun. Program prioritas adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang mendapatkan prioritas dalam pendanaan yang dilaksanakan untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Penetapan program dan kegiatan ini disusun dengan memperhatikan dan mempertimbangkan visi misi Gubernur serta tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Untuk mencapai sasaran yang ditetapkan melalui strategi dan kebijakan yang telah dirumuskan, maka program-program yang akan dilaksanakan pada tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini merupakan program yang mendukung aktivitas perkantoran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
4. Penyediaan Jasa Pengaman Kantor
5. Penyediaan Jasa Sopir Kantor
6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan Kantor
8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
10. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangan
11. Penyediaan Makanan dan Minuman
12. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam dan Luar Daerah
13. Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sarana dan prasarana aparatur di lingkungan Badan

Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional
2. Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi
3. Pengadaan Alat Studio, Alat Komunikasi dan Alat Informasi
4. Pengadaan Meubeleur
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Perlengkapannya
9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Studio, Komunikasi dan Informasi
10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi dan Jaringan
11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeleur
12. Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor
13. Pengadaan Meubeleur
14. Penataan dan Pengelolaan Arsip

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan disiplin aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya peningkatan kapasitas sumber daya aparatur di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penatausahaan Keuangan OPD

2. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja OPD

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya sistem pelaporan dan capaian kinerja dan keuangan di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi.

6. Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Kegiatan dan Asset

Program ini dilaksanakan bagi terwujudnya perencanaan, pengelolaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan dan asset di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan harapan akan memberikan dampak/manfaat/hasil yang maksimal dalam pencapaian tujuan organisasi

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran OPD
2. Monitoring dan Evaluasi Program dan Kegiatan OPD
3. Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset OPD

7. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Penanganan Masalah Strategis Daerah
2. Forum Diskusi Pimpinan Daerah
3. Pengawasan Orang Asing
4. Pengawasan dan Pencegahan Konflik Sosial
5. Peningkatan dan Pengawasan Kewaspadaan Dini Masyarakat
6. Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi
7. Penguatan Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial
8. Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penerbitan Rekomendasi/Ijin Penelitian
9. Pengawasan dan Pencegahan Terorisme
10. Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum
11. Forkomkon Jajaran Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbar
12. Sosialisasi dan Sinkronisasi Kelembagaan Kesbangpol se-Sumbar

8. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat
2. Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan
3. Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa
4. Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumatera Barat

5. Penguatan Wawasan Bela Negara
6. Sosialisasi Pewarisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa
7. Penguatan Forum Pembauran Kebangsaan
8. Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wawasan Kebangsaan
9. Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan
10. Fasilitasi Pembangunan Monumen Bela Negara
11. Pembangunan Karakter Bangsa Dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental

9. Program Pendidikan Politik Masyarakat

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Fasilitasi PAW Anggota DPRD Kabupaten/Kota di Sumbar
2. Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik
3. Sosialisasi dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan
4. Bimtek Pengajuan dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik
5. Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik
6. Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)
7. Dialog Politik Bersama Partai Politik, Ormas dan Tokoh Masyarakat

10. Program Pencegahan, Penanganan dan Rehabilitasi Narkoba

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba
2. Fasilitasi Peringatan Hari Anti Narkotika Internasional (HANI)
3. Penyusunan Ranperda tentang Bahaya Narkoba

11. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)

Rencana kegiatan dari program ini adalah sebagai berikut :

1. Pengawasan dan Pencegahan Perbuatan Maksiat

Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat disajikan pada tabel T-C.27 (lampiran).

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode RPJMD tercapai.

Skenario dan asumsi pembangunan daerah tahun 2016-2021 berpedoman kepada Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025, hasil evaluasi capaian kinerja pemerintah daerah sampai dengan saat ini, dan memperhatikan peluang dan tantangan selama kurun waktu lima tahun mendatang sampai dengan tahun 2018. Indeks pembangunan manusia merupakan tolok ukur pembangunan daerah yang harus dicapai pada setiap tahapan pembangunan jangka menengah.

Pada hakikatnya tugas pelayanan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat adalah untuk turut menjaga ketentraman dan ketertiban dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa khususnya daerah Provinsi Sumatera Barat. Dengan demikian, keterkaitan tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat dengan Misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Barat difokuskan pada Misi ke I yaitu “ *Meningkatnya Tata Kehidupan Yang Harmonis, Agamais, Beradat, Dan Berbudaya Berdasarkan Falsafah Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah dengan Sasaran yaitu Meningkatkan Kualitas Kehidupan Beragama, dan Kerukunan Antar-Umat Beragama dan Berkurangnya Penyakit Masyarakat (Pekat).*

Sedangkan indikator kinerja yang terkait dengan tujuan dan sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat adalah Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat, yang merupakan indikator yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat. Pada dasarnya IKU merupakan bagian dari indikator pencapaian sasaran dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat.

Adapun indikator kinerja Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, disajikan pada tabel T-C.28

Tabel T-C.28

Indikator Kinerja Badan Kesbangpol Prov.Sumbar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Indikator	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5	
1	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B	BB	BB	BB	BB	BB	BB
2	Jumlah konflik sosial di Sumbar	4 kasus	<5 kasus	<5 kasus	<5 kasus	<5 kasus	<5 kasus	<5 kasus
3	Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumbar	1,74%	5%	5%	5%	5%	5%	25%
4	Nilai Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Sumbar	67,46	60	68	70	72	74	76

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 merupakan suatu rencana yang ingin dicapai dalam jangka waktu lima tahun ke depan dan digunakan sebagai acuan dan pedoman dalam pembuatan kebijakan, program dan kegiatan. Renstra ini disusun dengan memperhatikan perkembangan situasi, kondisi, dan potensi yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat secara khusus dan kondisi, situasi, dan potensi yang ada di Provinsi Sumatera Barat pada umumnya.

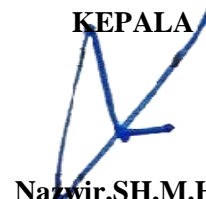
Penyusunan Renstra ini berpedoman pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021. Hasil pelaksanaan dari Renstra akan menjadi tolak ukur keberhasilan Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan pencapaian sasaran yang diinginkan. Tolak ukur ini terlihat dari laporan kinerja yang disampaikan pada akhir tahun anggaran melalui penilaian realisasi kinerja program/kegiatan.

Selanjutnya Renstra ini merupakan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Badan Kesbangpol Prov. Sumbar yang setiap tahunnya akan diadakan evaluasi untuk penyempurnaan atau penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan sesuai situasi dan kondisi yang berkembang. Dengan disusunnya Renstra ini, diharapkan upaya-upaya pembangunan di bidang kesatuan bangsa dan politik akan semakin terarah dan meningkat, dalam mendukung visi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih. Ke depannya, diharapkan Rencana Starategis ini dapat dijalankan sesuai rencana dan didukung oleh seluruh Sumber Daya Aparatur Badan Kesbangpol Provinsi Sumatera Barat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara umum.

Padang, 2019

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATRA BARAT**

KEPALA



Nazwir, SH, M. Hum

Pembina Utama Madya

NIP. 19641111 199003 1 008

LAMPIRAN

TABEL T-C.27
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN PENDANAAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	Kondisi Kinerja pada Awal Periode (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												Unit Kerja OPD Rencanung JawaB	Lokasi		
						2016		2017		2018		2019		2020		2021					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp				
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
Meningkatnya Kinerja organisasi	Meningkatnya Keterampilan organisasi	1. Nilai evaluasi kinerja 2. akurabilitas kinerja	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelayanan administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas	100%	100%	909.000.000	100%	964.000.000	100%	1.002.000.000	100%	1.052.000.000	100%	1.476.402.704	100%	2.009.000.000	100%	7.412.402.704	Badan Kesbang gpol	Sumbang
			- Penyediaan jasa sruat menyruat dan keuangan publikasian program/kegiatan	- Kebutuhan jasa pelayanan sruat menyruat	12 bulan	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	14.000.000	12 bulan	16.000.000	72 bulan	86.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Kebutuhan listrik, air dan telekomunikasi OPD	12 bulan	12 bulan	140.000.000	12 bulan	145.000.000	12 bulan	155.000.000	12 bulan	100.000.000	12 bulan	140.000.000	12 bulan	180.000.000	72 bulan	860.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan jasa kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	- Jumlah tenaga kebersihan, pengamanan dan sopir kantor	3 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 1 orang sopir	3 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 1 orang sopir	260.000.000	3 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 1 orang sopir	292.000.000	3 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 2 orang sopir	268.950.225	3 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 2 orang sopir	390.000.000	4 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 5 orang sopir	465.602.704	4 orang petugas kebersihan,4 orang pengaman kantor dan 4 orang sopir	600.000.000	20 orang petugas kebersihan,2 orang pengaman kantor dan 14 orang sopir	2.276.552.929	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan alat tulis kantor	- Kebutuhan alat tulis kantor	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	40.000.000	12 bulan	50.000.000	72 bulan	223.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan barang cetakan dan pengandaan	- Kebutuhan barang cetakan dan pengandaan	12 bulan	12 bulan	28.000.000	12 bulan	30.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	32.000.000	12 bulan	35.000.000	12 bulan	60.000.000	72 bulan	220.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	- Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	12 bulan	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	8.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	30.000.000	72 bulan	72.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	12 bulan	2 jenis	18.000.000	2 jenis	20.000.000	5 jenis	30.000.000	1 jenis	20.000.000	2 jenis	20.000.000	2 jenis	45.000.000	14 jenis	153.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundangan	- Surat kabar yang dibeli	156 eks	156 eks	14.000.000	156 eks	15.000.000	156 eks	20.000.000	156 eks	15.000.000	156 eks	18.000.000	156 eks	20.000.000	936 eks	102.000.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Penyediaan makanan dan minuman	- Kebutuhan makanan dan minuman rapat	12 bulan	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	10.000.000	12 bulan	20.000.000	12 bulan	25.200.000	12 bulan	40.000.000	72 bulan	115.200.000	Badan Kesbang pol	Padang
			- Rapat rapat koordinasi dan konsultasi ke daerah yang daerah	- Laporan rapat-rapat koordinasi ke daerah yang terpenuhi	12 bulan	12 bulan	389.000.000	12 bulan	400.000.000	12 bulan	426.049.775	12 bulan	413.000.000	12 bulan	700.000.000	12 bulan	938.000.000	72 bulan	3.266.049.775	Badan Kesbang pol	19 kabupaten

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN OUTPUT)	Kondisi Kerja pada Awal RENCANA (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD gung Jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kerja pada akhir periode Renstra SROD	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			- Penyediaan jasa pembaruan metal dan fisk apatur	- Kebutuhan pembaruan jamani dan tohni apatur	12 bulan	12 bulan	-	0	-	0	-	0	-	12 bulan	8.600.000	12 bulan	30.000.000	24 bulan	38.600.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana apatur	100%	100%	132.000.000	100%	83.000.000	100%	145.000.000	100%	133.000.000	100%	807.983.081	100%	254.000.000	100%	1.537.383.081	Badan Kesbang gpol	Sumbar
			- Pengadaan kendaraan dinas operasional	- Kendaraan dinas operasional yang diadkan	0	0	-	0	-	0	-	1 unit	14.000.000	1 unit	15.300.000	1 unit	30.000.000	2 unit	59.300.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Pengadaan komputer dan jaringan komputerisasi	- Komputer dan komputerisasi yang diadkan	0	2 unit	20.000.000	2 unit	18.500.000	20 unit	10.000.000	15 unit	10.000.000	33 unit	350.200.200	5 unit	34.000.000	54 unit	442.200.200	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Pengadaan perabotan studio dan komunikasi	- Alat studio dan alat komunikasi yang diadkan	0	1 unit	13.000.000	0	-	4 unit	10.000.000	1 unit	10.000.000	2 unit	14.133.960	2 unit	20.000.000	10 unit	67.133.960	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Perbaikan rulu/berkala gedung kantor	- Gedung kantor yang diperlaha	1 unit	1 unit	20.000.000	1 unit	12.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	10.000.000	1 unit	20.000.000	1 unit	20.000.000	6 unit	102.000.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Perbaikan rulu/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kendaraan dinas/operasional yang diperlaha	5 unit	5 unit	45.500.000	5 unit	28.500.000	6 unit	58.000.000	7 unit	58.000.000	8 unit	135.987.296	9 unit	86.000.000	40 unit	411.997.296	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Perbaikan rulu/berkala perabotan dan perlengkapan kantor	- Perabotan dan perlengkapan yang diperlaha	25 unit	25 unit	7.500.000	17 unit	8.000.000	16 unit	9.000.000	15 unit	5.700.000	15 unit	4.950.000	15 unit	4.950.000	103 unit	40.100.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Perbaikan rulu/berkala komputer dan jaringan komputerisasi	- Komputer/printer/lanyu yang diperlaha	0 unit	5 unit	13.000.000	15 unit	13.000.000	27 unit	15.000.000	27 unit	7.000.000	27 unit	15.600.000	27 unit	15.600.000	128 unit	79.200.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Perbaikan rulu/berkala alat studio, komunikasi dan informasi	- Alat studio/alat komunikasi dan alat informasi yang diperlaha	6 unit	6 unit	3.000.000	3 unit	3.000.000	5 unit	3.000.000	5 unit	1.500.000	5 unit	2.500.000	7 unit	2.500.000	33 unit	15.500.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Pengadaan perabotan dan perlengkapan aset OPD	- Honorarium pejabat perabotan barang dan jasa dan perabotan aset	4 orang	4 orang	10.000.000	0	-	4 orang	20.000.000	0	-	0	-	0	-	8 orang	30.000.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	- Gedung kantor yang diperlaha	0 unit	1 unit	0	0	0	0	-	1 unit	10.000.000	1 unit	90.000.000	1 unit	33.950.000	4 unit	133.950.000	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Pengadaan meubeler	- Meubeler yang diadkan						18 unit		20 unit	6.800.000	31 unit	141.701.625	1 unit	7.000.000	45 unit	155.501.625	Badan Kesbang pdl	Padang
			- Pengadaan Pelembab dan Pendinginan Kantor	- Pelembab dan pendinginan yang diadkan										2 unit	17.600.000						
			Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya disiplin dan etos kerja apatur	100%	100%	30.000.000	100%	27.000.000	100%	33.000.000	100%	34.000.000	100%	36.750.000	100%	65.000.000	100%	225.750.000	Badan Kesbang gpol	Sumbar
			- Pengadaan Pakelan Dinas dan Peninggiapannya	- Pakelan dinas yang diadkan	47 stel	47 stel	30.000.000	50 stel	27.000.000	50 stel	33.000.000	45 stel	34.000.000	49 stel	36.750.000	50 stel	65.000.000	290 stel	225.750.000	Badan Kesbang pdl	Padang

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN (OUTPUT))	Kondisi Kerja pada Awal RZMD (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN RANGKAIK PENDANAAN										Unit Kerja OPD gung Jawab	Lokasi					
						2016		2017		2018		2019		2020				2021		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			- Pengalihan, pengawasan dan pengendalian aset OPD	- Honorarium pengelola aset	4 orang	0		4 orang	76.000.000	0		0		0		0		0	4 orang	76.000.000	Badan Kesbang pd	Padang
			- Perancangan masalah strategis daerah	- 1. Rapat tim masalah strategis daerah (rapat komand/tim masalah strategis daerah/tim ForKopinda) ; 2. Monitoring masalah strategis di daerah; 3. Rapat Tim Kewaspadaan Diri Pemerintah Daerah (TKOPD)	100%	20%	909.000.000	40%	1.770.000.000	60%	995.000.000	80%	1.091.000.000	90%	1.666.380.394	100%	2.083.000.000	100%	85.514.380.394	1.506.434.794	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Pengawasan orang asing	- 1.Rapat Tim Pengawasan Orang Asing (POA); 2. Monitoring keberadaan orang asing di daerah; 3. Rampung Pengawasan Orang Asing	3 kali rapat tim	3 kali rapat tim	50.000.000	1 kali rapat tim	80.000.000	5 kali rapat tim	75.000.000	4 kali rapat tim	80.000.000	4 kali rapat tim	400.000.000	4 kali rapat tim	150.000.000	24 kali rapat tim	835.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber	
			- Pengawasan dan pencapaian kinerja sosial	- 1. Piontoring ; 2. Buku pemeaan Retersi Kinerja di Daerah	19 kali/kada	19 kali/kada	50.000.000	19 kali/kada	80.000.000	19 kali/kada	75.000.000	19 kali/kada	80.000.000	19 kali/kada	80.000.000	19 kali/kada	150.000.000	114 kali/kada	515.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber	
			- Pengawasan dan peningkatan kewaspadaan diri masyarakat	- 1. Rapat Tim FKDM ; 2. Rapat tim TKOPD; 3. Rakor FKDM	4 kali rapat, 19 kali/kada dan 1 laporan	4 kali rapat tim FKDM	65.000.000	4 kali rapat tim FKDM	80.000.000	4 kali rapat tim FKDM	80.000.000	6 kali rapat tim FKDM	80.000.000	5 kali rapat tim FKDM	135.945.600	2 kali rapat tim FKDM	300.000.000	22 kali rapat tim FKDM	740.945.600	Badan Kesbang pd	Sumber	
			- Rapat Koordinasi Kelembagaan Ekonomi dan Budaya	- 1. Rakor; 2. Monitoring potensi ekonomi di Sumber	1 kali rakor	1 kali rakor	65.000.000	1 kali rakor	80.000.000	1 kali rakor	75.000.000	1 kali rakor	80.000.000	2 kali rapat TKOPD	0	0	0	2 kali rapat TKOPD	0	300.000.000	Badan Kesbang pd	
			- Penguatan tim terpadu peanaangan konflik sosial	- 1. Rapat Timdru PKS; 2.Rakor Timdru PKS ; 3. Monitoring; 4. Laporan Rencana Aksi	8 rapat timdru PKS	8 rapat timdru PKS	115.000.000	9 rapat timdru PKS	120.000.000	4 rapat timdru PKS	125.000.000	4 rapat timdru PKS	127.000.000	6 rapat timdru PKS	236.000.000	4 rapat timdru PKS	250.000.000	33 rapat timdru PKS	973.000.000	Badan Kesbang pd		
			- Pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan perterbihan rekorteras/ jin pertebihan	- Laporan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Jin rekorteras	1 laporan	1 laporan	50.000.000	1 laporan	60.000.000	3 laporan rencana aksi	0	0	0	0	0	0	18 laporan rencana aksi	110.000.000	Badan Kesbang pd			

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN (OUTPUT))	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Pening gung Jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020				2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			- Pengawasan dan pencapaian teorisme	- 1. Monitoring potensi aksi teorisme di daerah; 2. Pembekalan pencapaian aksi radikalisme dan potensi aksi terorisme di daerah.	19 kab/kota	19 kab/kota	50.000.000	19 kab/kota	100.000.000	19 kab/kota	50.000.000	19 kab/kota	80.000.000	19 kab/kota	150.000.000	19 kab/kota	200.000.000	114 kab/kota	630.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Pemantauan pelaksanaan pemilihan umum	- 1. Rapat tim penentuan pemilu; 2. Jumlah pemantauan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu	2 kali rapat 19 kab/kota	2 kali rapat 2 kab/kota	200.000.000	1 kali rapat 6 kab/kota	220.000.000	1 kali rapat 19 kab/kota	200.000.000	0	0	-	-	0	-	2 kali rapat 25 kab/kota	620.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/ Kota di Sumber	- Verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD kab/kota	0	0	-	19 kab/kota	-	19 kab/kota	85.000.000	0	0	-	-	0	-	38 kab/kota	85.000.000	Badan Kesbang pd	
			- Pengadaan bantuan keuangan partai politik	- Jumlah partai yang difasilitasi	0	0	-	11 partai	180.000.000	0	-	0	0	-	-	0	-	11 partai	180.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Sosialisasi undang undang dan peraturan bidang politik	- Sosialisasi	1 kali	0	-	1 kali	190.000.000	0	-	0	-	-	-	0	-	1 kali	190.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Forkonkon jabatan Kesbangpol provinsi dan kab/kota se-Sumber	- Rapat koordinasi Jajaran Kesbangpol se-Sumber	1 kali rakor	0	50.000.000	-	-	-	-	1 kali rakor	68.000.000	1 kali rakor	100.000.000	1 kali rakor	100.000.000	3 kali rakor	318.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Sosialisasi dan sinkronisasi kelengkapan kebhargopol se-Sumber	- Sosialisasi	1 kali	1 kali	100.000.000	-	-	-	-	1 kali	64.995.400	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	4 kali	364.995.400	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan dan pengendalian ketahanan ekonomi di Sumber	1. Rapat Tim Forkopinda ; 2. Monitoring isu strategis di daerah	0	0	-	-	-	2 kali rakor	100.000.000	0	-	1 kali rakor	236.000.000	4 kali rapat 19 kab/kota	4 kali rapat 19 kab/kota	283.000.000	646.004.600	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Mengembangkan kewilayahan dan berdaya raga	1. Rapor potensi konflik akibat gejalak ekonomi di Sumber	0	0	-	-	-	19 kab/kota	100.000.000	0	-	1 kali rakor	100.000.000	1 kali rakor	300.000.000	4 kali rakor	500.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			Program Pengembangan Kewilayahan dan Kewilayahan	Meningkatnya rasa kesetiaan dan kehadiran berdaya raga, ketekuna	100%	20%	787.000.000	40%	523.000.000	60%	860.000.000	80%	943.000.000	90%	1.980.000.000	100%	1.801.000.000	0	5.713.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Sosialisasi dan penguatan organisasi Kepercayaan masyarakat	1. Sosialisasi; 2. Rapat Tim Pakem; 3. Monitoring akan kepercayaan di Sumber	1 kali sosialisasi 19 kab/kota	1 kali sosialisasi 2 rapat tim Pakem	80.000.000	0	60.000.000	1 kali sosialisasi 1 rapat tim Pakem	70.000.000	1 kali sosialisasi 2 rapat tim Pakem	95.000.000	1 kali sosialisasi 2 rapat tim Pakem	100.000.000	1 kali sosialisasi 2 rapat tim Pakem	250.000.000	5 kali sosialisasi 9 rapat tim Pakem	655.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Forum pematangan wawasan kebangsaan	- Sosialisasi	1 kali sosialisasi	1 kali sosialisasi	63.000.000	0	-	2 kali sosialisasi	180.000.000	5 kali sosialisasi	273.000.000	-	-	-	8 kali sosialisasi	-	Badan Kesbang pd	Sumber	

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTPUT DAN KEGIATAN OUTPUT)	Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD Pening gung Jawab	Lokasi				
						2016		2017		2018		2019		2020				2021			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
			- Pendidikan Wawasan Kebangsaan	1. Pelatihan pendirian wawasan kebangsaan; 2. Rapat tim PVWK		1 kali sosialisasi	65.000.000	-	-	1 kali sosialisasi	80.000.000	-	-	4 kali ; 2 kali rapat	450.000.000	3 kali ; 2 kali rapat	250.000.000	7 kali ; 4 kali rapat	700.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Sosialisasi pematangan ketahanan bangsa	- Sosialisasi	1 kali sosialisasi	65.000.000	-	-	-	1 kali sosialisasi	80.000.000	-	-	-	-	-	-	2 kali sosialisasi	145.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Pematangan umut bergama di Sumatera Barat	- 1. Rakor FKUB ; 2. Rapat tim FKUB 3.Monitoring potensi konflik antar umat bergama di Sumbar	2 rakor FKUB 12 rapat tim FKUB 19 kab/kota	2 rakor FKUB 12 rapat tim FKUB 19 kab/kota	75.000.000	1 rakor FKUB 12 rapat tim FKUB 19 kab/kota	80.000.000	0	90.000.000	1 rakor FKUB 2 rapat tim FKUB 19 kab/kota	95.000.000	1 rakor FKUB 10 rapat tim FKUB 19 kab/kota	100.000.000	1 rakor FKUB 10 rapat tim FKUB 19 kab/kota	250.000.000	6 rakor FKUB 56 rapat tim FKUB 114 kab/kota	690.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan wawasan bela negara	- Pelatihan	1 kali	65.000.000	2 kali	130.000.000	2 kali	70.000.000	2 kali	90.000.000	2 kali	2 kali	415.000.000	2 kali sosialisasi	250.000.000	11 kali sosialisasi	1.020.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Sosialisasi pewartan nilai-nilai luhur bangsa	- Sosialisasi	1 kali sosialisasi	65.000.000	2 kali sosialisasi	130.000.000	2 kali sosialisasi	70.000.000	2 kali sosialisasi	100.000.000	3 kali	3 kali	235.000.000	3 kali	250.000.000	7 kali sosialisasi	485.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Realisasi dan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila	- Penataan program nilai-nilai Pancasila	1 kali sosialisasi	60.000.000	1 kali sosialisasi	60.000.000	1 kali sosialisasi	80.000.000	1 kali sosialisasi	100.000.000	2 rapat tim FPK	6 kali ; 2 kali rapat tim	500.000.000	4 kali ; 2 kali rapat tim	250.000.000	10 kali ; 4 kali rapat tim FPK	750.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan forum kebangsaan	- 1. Sosialisasi Kebijakan Yang berkaitan dengan pambauran Kebangsaan ; 2.Rapat tim FPK	2 rapat tim FPK 2 rapat tim FPK	2 rapat tim FPK 2 rapat tim FPK	60.000.000	1 kali sosialisasi	60.000.000	1 kali sosialisasi	80.000.000	1 kali sosialisasi	100.000.000	2 rapat tim FPK	-	-	-	8 rapat tim FPK	613.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan pembauran kebangsaan	1. Sosialisasi; 2. Rapat tim Forum Kebangsaan	2 kali rapat 19 kab/kota	2 kali rapat 19 kab/kota	87.000.000	2 kali rapat 19 kab/kota	65.000.000	2 kali rapat 19 kab/kota	130.000.000	2 kali rapat 19 kab/kota	90.000.000	2 kali rapat 19 kab/kota	90.000.000	2 kali rapat 19 kab/kota	151.000.000	2 kali rapat 114 kab/kota	613.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	- Sosialisasi	1 kali	75.000.000	-	-	-	1 kali sosialisasi	90.000.000	-	-	-	-	-	-	1 kali sosialisasi	165.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Penguatan pembangunan monumen bela negara	- Rapat tim fasilitasi pembangunan monumen bela negara	1 kali rapat	150.000.000	2 kali rapat	150.000.000	2 kali rapat	-	-	-	-	2 kali rapat	-	-	-	1 kali rapat	150.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			- Pembangunan karakter bangsa dalam upaya mendukung revisi mental	1. Sosialisasi GNK; 2. Rapat Kerja GNRM	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1 kali sosialisasi GNRM 1 kali rapat GNRM	118.000.000	2 kali sosialisasi GNRM 2 kali rapat GNRM	100.000.000	1 kali sosialisasi GNRM 2 kali rapat GNRM	90.000.000	2 kali rapat GNRM	233.000.000	7 kali sosialisasi GNRM 7 kali rapat GNRM	340.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber
			2. Persentase penurunan angka kriminalitas di Sumber	Program Pencegahan, Rehabilitasi dan Pembenaran Naraboda	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembenaran naraboda di daerah	100% 20%	40%	200.000.000	60%	118.000.000	80%	122.000.000	90%	600.000.000	100%	233.000.000	1.273.000.000	Badan Kesbang pd	Sumber		

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME DAN KEGIATAN OUTPUT)	Kondisi Awal RENCANA (Tahun 0)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										Unit Kerja OPD gung Jawab	Lokasi					
						2016		2017		2018		2019		2020				2021				
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp			
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	
			- Pagutan amir Waktu Anggaran DPRD Kabupaten/ Kota di Sumber	- Verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD kabupaten/kota	19 kab/kota	19 kab/kota	110.000.000	W	-	-	-	19 kab/kota	90.000.000	19 kab/kota	49.200.000	19 kab/kota	100.000.000	100.000.000	75 kab/kota	349.200.000	Badan Kestbang pd	Sumber
			- Pengelolaan bantuan keuangan partai politik	- Jumlah parpol yang diverifikasi;	11 parpol	11 parpol	110.000.000	0	-	11 parpol	100.000.000	11 parpol	100.000.000	16 parpol	80.000.000	16 parpol	150.000.000	54 parpol	540.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Sosialisasi dan pembinaan ormas	- 1. Sosialisasi : 2. Monitoring keberhasilan/aktivitas ormas di daerah	5 kali sosialisasi 19 kab/kota	5 kali sosialisasi 19 kab/kota	109.000.000	0	-	1 kali sosialisasi 19 kab/kota	80.000.000	1 kali sosialisasi 19 kab/kota	100.000.000	2 kali sosialisasi 19 kab/kota	160.000.000	2 kali sosialisasi 19 kab/kota	500.000.000	11 kali sosialisasi 95 kab/kota	949.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Bimtek, pengajaran dan pertanggung-jawaban bantuan keuangan partai politik	- Bimtek bantuan keuangan parpol	1 kali	1 kali	135.000.000	1 kali	-	1 kali	100.000.000	1 kali	100.000.000	1 kali/80 orang	80.000.000	1 kali	120.000.000	6 kali	610.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Sosialisasi undang-undang dan peraturan bidang politik	- Sosialisasi	1 kali	1 kali	115.000.000	0	-	1 kali	100.000.000	1 kali	110.000.000	2 kali	204.155.876	1 kali	300.000.000	5 kali	829.155.876	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Monitoring dan evaluasi program kegiatan OPD	- Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	1 laporan	1 laporan	420.000.000	0	-	1 laporan	450.000.000	1 laporan	-	-	-	1 laporan	-	2 laporan	870.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Fortkomsen jabatan	- Rapat koordinasi jabatan Kestbangpd se-Sumber	0	1 kali rapat	-	0	-	2 kali rapat	100.000.000	0	-	-	-	0	0	3 kali rapat	100.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Sosialisasi dan sinkronisasi kelembagaan jajaran Kestbangpd se-Sumber	- Sosialisasi	0	0	-	2 kali	-	1 kali	150.000.000	-	-	-	-	-	-	3 kali	220.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Pengutan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia	- 1. Rapat Pokja IDI; 2. Sosialisasi Hasil IDI	0	0	100.000.000	2 kali rapat 1 kali sosialisasi	70.000.000	1 kali rapat 1 kali sosialisasi	94.000.000	1 kali rapat 1 kali sosialisasi	200.000.000	1 kali rapat 1 kali sosialisasi	300.000.000	1 kali rapat 1 kali sosialisasi	300.000.000	6 kali rapat 6 kali sosialisasi	1.094.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
			- Dialog politik bersama partai politik, ormas dan tokoh masyarakat	- Dialog politik	4 kali	4 kali	249.000.000	2 kali	100.000.000	10 kali	300.000.000	1 kali	210.000.000	6 kali	450.000.000	4 kali	389.000.000	24 kali	1.698.000.000	Badan Kestbang pd	Sumber	
TOTAL							4.506.000.000		4.590.000.000		5.056.000.000		5.471.000.000		10.110.024.805		10.446.000.000		38.978.424.805			


Kepala Badan
MZWIR, SH, M.Hum
 NIP.1984111 199003 1 008

Tabel
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Renstra
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sumatera Barat

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (renstra Perangkat Daerah) tahun 2016-2021	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2017	Target dan Realisasi Kinerja Program dan kegiatan tahun lalu 2018 (n-2)			Tingkat Realisasi (%)	Target Program dan Kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2019 (n-1))	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)			Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2019 (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10=5+7+9	11=10/4	
1	Urusan : Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat										
1 01	Bidang Urusan : Kesatuan Bangsa dan Politik										
1 01 01	Program Pelebaran Administrasi Perkantoran	Tercapainya pelebaran administrasi perkantoran untuk kepentingan dinas	100 %	100 %	100 %	100 %	100%	100 %	100	100%	
1 01 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	Kebutuhan jasa pelayanan surat menyurat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Kebutuhan listrik, air, dan telekomunikasi OPD	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 03	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	Peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli	14 jenis	4 Jenis	5 jenis	5 Jenis	100	1 Jenis	10	71,43	
1 01 01 04	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah tenaga kebersihan kantor	20 orang	6 orang	3 orang	3 orang	100	3 orang	12	60,00	
1 01 01 05	Penyediaan alat tulis kantor	Kebutuhan alat tulis kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 06	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 07	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 08	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Surat kabar yang dibeli	936 eks	312 eks	156 eks	156 eks	100	156 eks	624	66,67	
1 01 01 09	Penyediaan makanan dan minuman	Kebutuhan makanan dan minuman rapat	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	Kebutuhan rapat-rapat koordinasi ke dalam dan luar daerah yang terpenuhi	72 bulan	24 bulan	12 bulan	12 bulan	100	12 bulan	48	66,67	
1 01 01 11	Penyediaan jasa Sopir Kantor	Jumlah tenaga sopir kantor	14 orang	2 orang	2 orang	2 orang	100	2 orang	6	42,86	
1 01 01 12	Penyediaan jasa Pengamanan Kantor	Jumlah tenaga pengamanan kantor	24 orang	8 orang	4 orang	4 orang	100	4 orang	16	66,67	
1 01 01 13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Fisik dan Mental Aparatur	Kebutuhan jasmani dan rohani aparatur	24 bulan	0 bulan	0 bulan	0 bulan	-	0 bulan	0	0,00	

1 01 06	Program Perencanaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian kegiatan dan anggaran SKPP Asset	Tersusunnya perencanaan dan anggaran SKPP	100	%	100	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	0	%	100		
1 01 06 .01	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	Rencana Kerja SKPD, Rencana Strategis SKPD, RKA SKPD, DPA SKPD, DPPA SKPD dan dokumen perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan	6	dokumen	6	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	6	orang	100,00
1 01 06 .02	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	1	dokumen	100,00
1 01 06 .03	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Asset SKPD	Honorarium pejabat pengadaan barang dan jasa dan pengelola asset	4	orang	4	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	0	orang	4	orang	100,00
1 01 07 01	Program Kentraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Meningkatnya wawasan kebangsaan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	100	%	40	%	60	%	60	%	100%	80	%	80	%	80%					
1 01 07 01	Penguatan Wawasan Bela Negara	Sosialisasi Penguatan Wawasan Bela Negara	11	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	100	2	kali sosialisasi	7	kali sosialisasi	63,64					
1 01 07 02	Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Pemantapan Wawasan Kebangsaan	14	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	100	5	kali sosialisasi	8	kali sosialisasi	57,14					
1 01 07 03	Pembinaan dan Koordinasi Pemantapan Idiologi dan Wadbang	1.Rapat; 2.Monitoring;	12	kali rapat	4	kali rapat	2	kali rapat	2	kali rapat	100	2	kali rapat	8	kali rapat	66,67					
			114	kab/kota	38	kab/kota	19	kab/kota	19	kab/kota	100	19	kab/kota	76	kab/kota	66,67					
1 01 07 04	Pembangunan Karakter Bangsa dalam Upaya Mendukung Revolusi Mental	1. Sosialisasi GNRM; 2. Rapat Kerja GNRM	7	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	2	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	42,86					
			7	kali rapat GNRM	0	kali rapat GNRM	1	kali rapat GNRM	1	kali rapat GNRM	100	2	kali rapat GNRM	3	kali rapat GNRM	42,86					
1 01 07 05	Penguatan Forum Pembaruan Kebangsaan	1. Sosialisasi Kebijakan yang berkaitan dengan pembaruan Kebangsaan ; 2.Rapat tim FPK	6	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	4	kali sosialisasi	66,67					
			12	kali rapat tim FPK	4	tim.FPK	2	kali rapat tim.FPK	2	kali rapat tim.FPK	100	2	kali rapat tim.FPK	8	kali rapat tim.FPK	66,67					
1 01 07 06	Sosialisasi Pewartisan Nilai-Nilai Luhur Bangsa	Sosialisasi tentang Nilai-Nilai Luhur Bangsa	11	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	100	2	kali sosialisasi	7	kali sosialisasi	63,64					
1 01 07 07	Pembinaan Kerukunan Umat Beragama di Sumbang	1. Rakor FKUB ; 2. Rapat tim FKUB 3.Monitoring	6	rapor FKUB	3	rapor FKUB	0	rapor FKUB	0	rapor FKUB	-	1	rapor FKUB	4	rapor FKUB	66,67					
			56	rapat tim FKUB	24	rapat tim FKUB	10	rapat tim FKUB	10	rapat tim FKUB	100	2	rapat tim FKUB	36	rapat tim FKUB	64,29					
			114	kab/kota	38	kab/kota	19	kab/kota	19	kab/kota	100	19	kab/kota	76	kab/kota	66,67					
1 01 07 08	Sosialisasi dan Penanganan Organisasi Aliran Kepercayaan Masyarakat	1. Sosialisasi; 2. Rapat Tim Pakem; 3. Monitoring	6	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	50,00					
			9	rapat tim Pakem	2	rapat tim Pakem	1	rapat tim Pakem	1	rapat tim Pakem	100	2	rapat tim Pakem	5	rapat tim Pakem	55,56					
			114	kab/kota	38	kab/kota	19	kab/kota	19	kab/kota	100	19	kab/kota	76	kab/kota	66,67					
1 01 07 09	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	Sosialisasi Pemantapan Ketahanan Bangsa	2	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	-	0	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	100,00					
1 01 07 10	Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	Sosialisasi Penguatan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan	2	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	-	0	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	100,00					
1 01 07 11	Percepatan Pembangunan Monumen Bela Negara	Rapat tim fasilitasi pembangunan monumen bela negara	6	kali rapat	3	kali rapat	0	kali rapat	-	kali rapat	-	0	kali rapat	3	kali rapat	50,00					
1 01 08	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Terwujudnya sistem dan budaya politik yang demokratis serta mantapnya hubungan supra dan infra struktur politik di daerah	100	%	40	%	60	%	60	%	100%	80	%	80	%	80%					
1 01 08 01	Dialog Politik Bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat	Dialog Politik Bersama Parpol, Ormas dan Tokoh Masyarakat	24	kali	6	kali	10	kali	10	kali	100	1	kali	17	kali	70,83					

1	01	08	02	Pengelolaan Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah parpol yang diverifikasi	54	parpol	11	parpol	11	parpol	11	parpol	100	11	parpol	33	parpol	61,11
1	01	08	03	Sosialisasi dan Pembinaan Ormas	1. Sosialisasi ; 2. Monitoring	11	kali sosialisasi	5	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	7	kali sosialisasi	63,64
						114	kab/kota sosialisasi	38	kab/kota sosialisasi	19	kab/kota sosialisasi	19	kab/kota sosialisasi	100	19	kab/kota sosialisasi	76	kab/kota sosialisasi	66,67
1	01	08	04	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Sosialisasi UU dan peraturan bidang politik	5	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	60,00
1	01	08	05	Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten/kota di Sumbang	Verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD kabupaten/kota	95	kab/kota	38	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	19	kab/kota	57	kab/kota	60,00
1	01	08	06	Bintek Pengujian dan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan Partai Politik	Jumlah bintek pengujian dan pertanggungjawaban bantuan keuangan parpol	6	kali	2	kali	1	kali	1	kali	100	1	kali	4	kali	66,67
1	01	08	07	Penguatan Kelompok Kerja Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)	1. Rapat Pokja IDI; 2. Sosialisasi Hasil IDI	6	kali rapat sosialisasi	2	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	4	kali sosialisasi	66,67
						6	kali sosialisasi	2	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	1	kali sosialisasi	4	kali sosialisasi	66,67
1	01	08	08	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum	1. Rapat tim pemantauan pemilu; 2. Jumlah pemantauan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu	3	kali rapat kab/kota	0	kali rapat kab/kota	1	kali rapat kab/kota	1	kali rapat kab/kota	100	1	kali rapat kab/kota	2	kali rapat kab/kota	66,67
						57	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	kab/kota	0	19	kab/kota	19	kab/kota	33,33
1	01	08	09	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	Jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi program dan kegiatan	1	dokumen	1	dokumen	0	dokumen	0	dokumen	0	0	dokumen	1	dokumen	100,00
1	01	08	10	Forkomkon Jaringan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbang	Rapat Koordinasi Jaringan Kesbangpol se-Sumbang	2	kali rakor	0	kali rakor	2	kali rakor	2	kali rakor	100	0	kali rakor	2	kali rakor	100,00
1	01	08	11	Sosialisasi dan Sinkronisasi Kembangan Jaringan Kesbangpol se-Sumbang	Sosialisasi kembangan jaringan Kesbangpol se-Sumbang	1	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100	0	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100,00
1	01	09	01	Program Pencegahan, Penanganan Dan Rehabilitasi Penyalahgunaan Narkoba	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat	100	%	40	%	60	%	60	%	100%	80	%	80	%	80%
1	01	09	01	Pembekalan Penanggulangan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkoba Dan Fasilitas Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	1.Sosialisasi P4GN; 2. Peringatan HANI ; 3. Jumlah Naskah Akademis Ramperda Narkoba	7	kali sosialisasi P4GN	4	kali sosialisasi P4GN	-	kali sosialisasi P4GN	0	kali sosialisasi P4GN	-	1	kali sosialisasi P4GN	5	kali sosialisasi P4GN	71,43
						2	kali upacara HANI	0	kali upacara HANI	-	kali upacara HANI	0	kali upacara HANI	-	0	kali upacara HANI	0	kali upacara HANI	0,00
						1	Naskah Akademis	1	Naskah Akademis	-	Naskah Akademis	0	Naskah Akademis	-	0	Naskah Akademis	1	Naskah Akademis	100,00
1	01	09	02	Peringatan Hari Anti Narkoba Internasional (HANI)	Peringatan HANI	2	kali upacara HANI	1	kali upacara HANI	-	kali upacara HANI	0	kali upacara HANI	-	1	kali upacara HANI	2	kali upacara HANI	100,00
1	01	09	03	Sosialisasi Perda tentang Bahaya Penyalahgunaan Narkoba	Sosialisasi Perda Fasilitas P4GN	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	-	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	-	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100,00
1	01	10	01	Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pemberantasan penyakit masyarakat	100	%	40	%	60	%	60	%	100%	80	%	80	%	80%
1	01	10	01	Pengawasan dan Pencegahan Perubahan Maksimal	1. Sosialisasi pengawasan dan pencegahan perubahan makstat; 2. Jumlah Perda tentang makstat; 3. Jumlah Perda tentang makstat	8	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	3	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	2	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	2	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	100	1	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	6	kali sosialisasi Perda tentang Narkoba	75,00

1	01	11	08	Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelibatan Rekomendasi Jjin Penelitian	Laporan Pemantauan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Penelibatan Jjin Penelitian	2	laporan	2	laporan	0	laporan	0	laporan	-	0	laporan	2	laporan	100,00
1	01	11	09	Rapat Koordinasi Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya	1. Rakor; 2. Monitoring potensi konflik akibat gejolak ekonomi di Sumbang	4	kali rakor kab/kota	2	kali rakor kab/kota	1	kali rakor kab/kota	1	kali rakor kab/kota	100	1	kali rakor kab/kota	4	kali rakor kab/kota	100,00
1	01	11	10	Pengawasan dan Pengendalian Ketahanan Ekonomi	1. Rakor; 2. Money potensi konflik akibat gejolak ekonomi di Sumbang	4	kali rakor kab/kota	0	kali rakor kab/kota	2	kali rakor kab/kota	2	kali rakor kab/kota	100	0	kali rakor kab/kota	2	kali rakor kab/kota	50,00
1	01	11	11	Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum	1. Rapat tim pemantauan pemilu; 2. Jumlah pemantauan tahapan dan penyelenggaraan Pemilu	4	kali rapat kab/kota	3	kali rapat kab/kota	1	kali rapat kab/kota	1	kali rapat kab/kota	100	0	kali rapat kab/kota	4	kali rapat kab/kota	100,00
1	01	11	12	Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kabupaten/kota di Sumbang	Verifikasi berkas calon PAW anggota DPRD kabupaten/kota	19	kali/kota	0	kali/kota	19	kali/kota	19	kali/kota	100	0	kali/kota	19	kali/kota	100,00
1	01	11	13	Sosialisasi Undang-Undang dan Peraturan Bidang Politik	Sosialisasi UU dan peraturan bidang politik	1	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	0	0	kali sosialisasi	1	kali sosialisasi	100,00
1	01	11	14	Forkomkon Jaringan Kesbangpol Provinsi dan Kab/Kota se-Sumbang	Rapat Koordinasi jaringan Kesbangpol se-Sumbang	3	kali rakor	0	kali rakor	0	kali rakor	0	kali rakor	0	1	kali rakor	1	kali rakor	33,33
1	01	11	15	Sosialisasi dan Sinkronisasi Kebutuhan Jaringan Kesbangpol se-Sumbang	Sosialisasi kelembagaan jaringan Kesbangpol se-Sumbang	6	kali sosialisasi	3	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	0	kali sosialisasi	0	1	kali sosialisasi	4	kali sosialisasi	66,67

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**

NAZWER, SH, M, Hum

Pembina Utama Madya

Nip.19641111 199003 1 008